



PEMERINTAH
PROVINSI
GORONTALO

RENSTRA

**DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025-2029**

dinsos.gorontaloprov.go.id
Jl. Birgjen Piola Isa, Kel Dulomo Selatan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkah dan rahmat Nya, Rencana Strategis (RENTA) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode empat tahun serta dimaksudkan untuk memudahkan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya dibidang Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 ini mengacu kepada visi dan misi Jangka Panjang Daerah. Renstra yang telah disusun ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo hingga periode tahun akhir RPJMD.

Mengingat dalam penyusunan Renstra ini masih banyak terdapat kekurangan yang harus disempurnakan, kami sangat mengharapkan masukan, saran/pendapat maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo pada tahun mendatang.

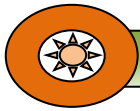
Akhir kata kami berharap semoga RENTRA ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo khususnya dan Provinsi Gorontalo pada umumnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Gorontalo, Juni 2026

KEPADA DINAS SOSIAL,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

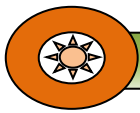


REKIN BUKTA, SE, M.Ec.Dev
NIP. 197612282000121002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	28
2.1.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab P.....	28
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	28
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.2.2 Isu Strategis.....	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	35
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	40
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah	40
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	65
BAB V PENUTUP	139
5.1 Kesimpulan	139
5.2 Kaidah Pelaksanaan	139
5.3 Pelaksanaan Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah	141



BAB I PENDAHULUAN

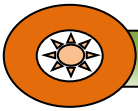
1.1. Latar Belakang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Daerah, telah dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah melalui penggabungan urusan pemerintahan bidang sosial dengan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ke dalam satu perangkat daerah, yaitu Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode perencanaan lima tahunan. Penyusunan Renstra ini merupakan konsekuensi dari adanya perubahan kelembagaan pemerintah daerah melalui penggabungan urusan pemerintahan bidang sosial dengan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Perubahan kelembagaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta penguatan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah.

Penggabungan kedua urusan tersebut tidak hanya merupakan perubahan nomenklatur perangkat daerah, tetapi juga membawa implikasi terhadap penyesuaian tugas dan fungsi, struktur organisasi, tata kelola pelayanan, program dan kegiatan, indikator kinerja, serta arah kebijakan pembangunan perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Renstra yang mampu mengintegrasikan mandat, peran, dan tanggung jawab kedua urusan secara komprehensif agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Secara substantif, urusan sosial dan urusan administrasi kependudukan serta pencatatan sipil memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan berbagai program kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat. Sebaliknya, pelaksanaan program sosial memberikan informasi dan umpan balik yang penting untuk meningkatkan kualitas data kependudukan, khususnya bagi kelompok rentan, masyarakat miskin, penyandang



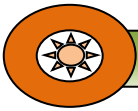
disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, serta kelompok masyarakat yang berisiko mengalami eksklusi administrasi kependudukan.

Integrasi kedua urusan tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan data kependudukan yang valid dan terkini. Selain itu, integrasi ini akan memperkuat validitas data penerima bantuan sosial sehingga penyaluran bantuan dapat dilaksanakan secara lebih tepat, transparan, dan akuntabel. Ketersediaan basis data kependudukan yang berkualitas juga menjadi instrumen penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai program pembangunan sosial di daerah.

Lebih lanjut, sinergi antara pelayanan sosial dan administrasi kependudukan diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar kependudukan sebagai prasyarat memperoleh berbagai layanan publik dan program perlindungan sosial. Melalui integrasi sistem, data, dan pelayanan, pemerintah daerah dapat menghadirkan layanan yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan daerah, penguatan integrasi urusan sosial dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil juga mendukung pengembangan kebijakan berbasis data (evidence-based policy). Ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, penyusunan program prioritas, serta penetapan target pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

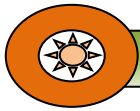
Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu empat tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.



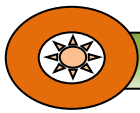
1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
9. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2009 Tentang penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

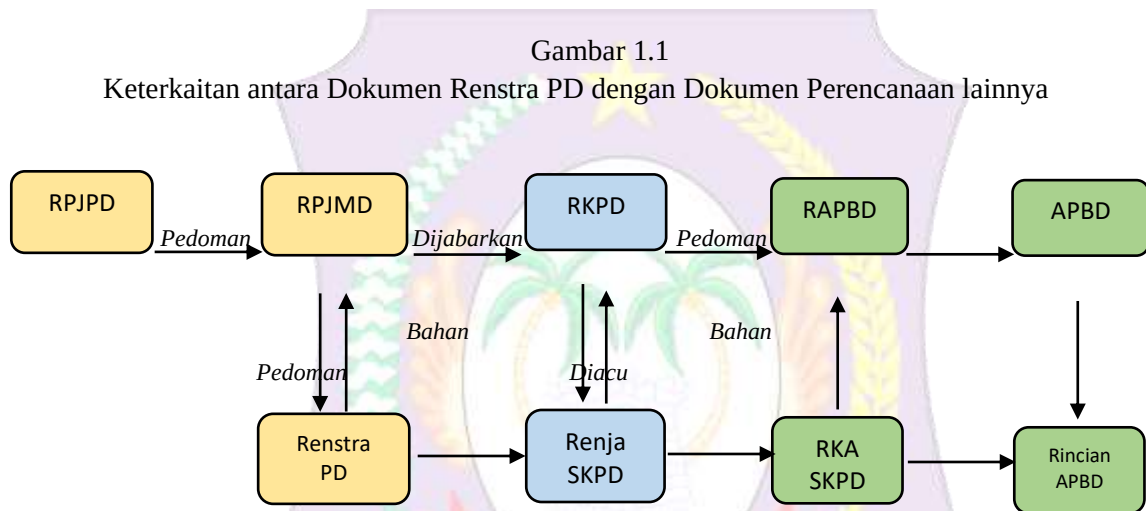


16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan ke IV atas Perpres No 26. Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP el;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan;
21. Peraturan Menteri Sosial RI No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029;
22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
24. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 – 2043;
25. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045.
26. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
28. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
29. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 12 Tahun 2025 tentang RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026.



31. Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renstra 2025-2029 Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo

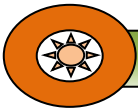
Dokumen renstra merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045. Renstra PD 2025-2029 menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan teknokratis perangkat daerah untuk periode lima tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, terarah, terukur, dan berkelanjutan. Renstra ini disusun untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah ke dalam kerangka kerja pembangunan urusan sosial, administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab perangkat daerah.



1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025- 2029 sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan agar pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan berjalan secara konsisten, terarah, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
2. Menjadi instrumen sinkronisasi dan harmonisasi antara target, sasaran, dan arah kebijakan dalam RPJMD dengan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga tercipta keterpaduan perencanaan pembangunan daerah.
3. Menjadi dasar dalam penetapan indikator kinerja perangkat daerah serta pengukuran capaian kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
4. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah guna memastikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif dan akuntabel.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan penyelenggaraan urusan sosial, administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil melalui perencanaan yang berbasis kinerja, data, dan kebutuhan masyarakat.
6. Mewujudkan integrasi pelaksanaan program dan layanan sosial dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil guna mendukung ketepatan sasaran pembangunan, peningkatan kualitas data, serta pelayanan yang lebih inklusif dan responsif kepada masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

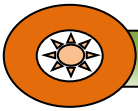
Rencana Strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, berisi tentang uraian bab demi bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan



1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah

2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberi layanan

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah
(apabila ada)

2.1.7 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada)

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategis

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

3.3 Strategi Perangkat Daerah

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

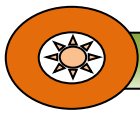
Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab V PENUTUP

5.2 Kesimpulan

5.2 Kaidah Pelaksanaan

5.3. Pelaksanaan Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI GORONTALO

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

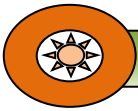
Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan kelembagaan terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Melalui pengaturan tersebut, urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan administrasi kependudukan serta pencatatan sipil diintegrasikan dalam satu perangkat daerah untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah yang berbasis data dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sebagai perangkat daerah yang mengemban dua rumpun urusan pemerintahan, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang mencakup urusan sosial dan urusan administrasi kependudukan serta pencatatan sipil. Kedua urusan tersebut dilaksanakan secara terpadu guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, serta pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan bagi seluruh penduduk.

1. Pelayanan Urusan Sosial

Pelayanan urusan sosial diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin dan kelompok rentan lainnya. Sasaran pelayanan meliputi penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus, korban bencana, fakir miskin, kelompok rentan sosial ekonomi, serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya.

Pelaksanaan pelayanan sosial juga didukung oleh pemanfaatan data sosial dan data kependudukan yang terintegrasi guna meningkatkan ketepatan sasaran program, validitas penerima bantuan sosial, serta efektivitas intervensi pemerintah daerah.



2. Pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap penduduk dalam memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mudah, cepat, tepat, dan akuntabel. Urusan ini juga berfungsi sebagai penyedia data dasar kependudukan yang menjadi rujukan bagi penyelenggaraan berbagai layanan publik dan perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Integrasi Pelayanan Sosial dan Administrasi Kependudukan

Penggabungan urusan sosial dengan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memberikan peluang untuk membangun sistem pelayanan yang lebih terpadu dan berbasis data. Integrasi kedua urusan tersebut mendukung peningkatan validitas data penerima bantuan sosial, percepatan pemutakhiran data masyarakat miskin dan rentan, peningkatan akses kelompok rentan terhadap dokumen kependudukan, serta penguatan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based policy).

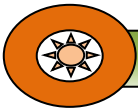
Melalui integrasi tersebut, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, inklusif, responsif, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial serta bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Susunan organisasi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo terdiri atas :

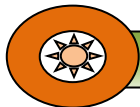
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat meliputi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.



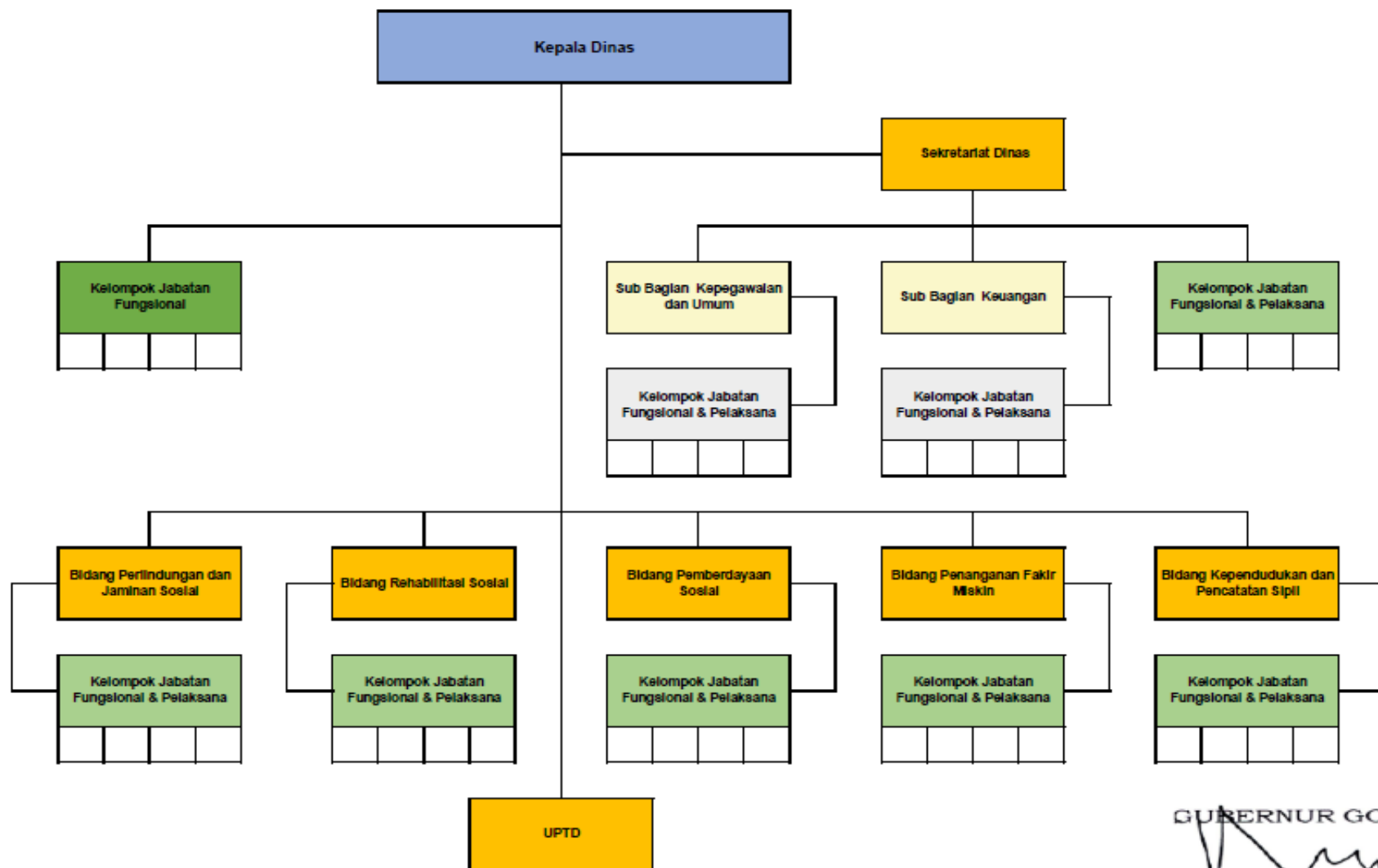
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- g. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Selengkapnya struktur organisasi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo sebagai berikut:





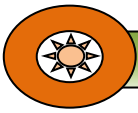
STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR GORONTALO,

GUSNAR ISMAIL

Active
Go to S



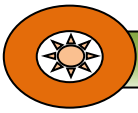
Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial serta Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang fakir miskin;
5. Pelaksanaan pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang sosial yang mencakup perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan fakir miskin;
6. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan fakir miskin; rehabilitasi sosial,
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan fakir miskin;
8. Pengoordinasian antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Daerah dan antar kabupaten/kota secara berkala;
9. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di Daerah;
10. Penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan data pribadi di Daerah dan kabupaten/kota;
11. Fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
12. Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
13. Sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
14. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
15. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
16. Pembinaan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, termasuk pembinaan pendokumentasian penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
17. Bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pendayagunaan data kependudukan;
18. Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan serta penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
19. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
20. Pemberian konsultasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
21. Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
22. Pengawasan penyelenggaraan kependudukan.

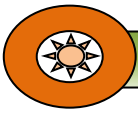
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan



pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum, dan kepegawaian.

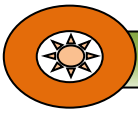
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan; b.
 2. Pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
 3. Pengelolaan umum dan kepegawaian;
 4. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
 5. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan sekretariat dan kegiatan dinas secara berkala;
 6. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
 7. Pembinaan aparatur;
 8. Fasilitasi pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota;
 9. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan kabupaten/kota;
 10. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
 11. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
- (1) Kelompok Fungsional perencanaan dan Pelaksana mempunyai tugas menyusun perencanaan dan evaluasi program kegiatan, penyusunan laporan kinerja dan melaksanakan pendataan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
- a) Menghimpun, mengolah, menyiapkan dan menyusun rencana program kegiatan;
 - b) Menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian serta laporan pelaksanaan program kegiatan;
 - c) Mengkompilasikan dan menyusun bahan rencana strategis dan rencana program Kegiatan;
 - d) Menganalisa dan menyusun usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - e) Melakukan koordinasi dan menyusun anggaran belanja langsung; f) Catatan:
 - f) Melakukan verifikasi ketersediaan anggaran;
 - g) menganalisa bahan-bahan pelaporan dan melakukan penyusunan laporan bulanan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Evaluasi Monitoring Program Kegiatan; dan
 - h) Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
- (2) Sub bagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi. Dalam



menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

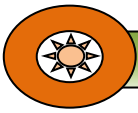
- a) Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan;
- c) Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- d) Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris;
- e) Mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah;
- f) Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai berbasis aplikasi;
- g) Pengembangan kapasitas SDM Aparatur;
- h) Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
- i) Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- j) Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k) Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- l) Penyiapan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- m) Pemantauan dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- n) Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris;
- o) Penyiapan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN, dan SPT;
- p) Penyiapan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja pegawai, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan minimum;
- q) Penyiapan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural;
- r) Penyiapan rencana kebutuhan barang unit;
- s) Pelaksanaan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang ditetapkan;
- t) Pelaksanaan tugas kehumasan;
- u) Pelaksanaan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- v) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD/ konsep surat berdasarkan telaahan bidang-bidang) dan kearsipan dinas;
- w) Pelaksanaan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah.
- x) Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah.



- 3). Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi dan pengawasan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a) Penatausahaan pengelolaan keuangan;
 - b) Menginput dan mengolah data keuangan;
 - c) Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah;
 - d) Penyusunan laporan pertanggungjawaban Perangkat Daerah;
 - e) Meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran;
 - f) Penyiapan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;
 - g) Penyiapan dan menerbitkan SPM;
 - h) Pengajuan spm beserta kelengkapan dokumen kepada bud melalui bendahara pengeluaran;
 - i) Pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
 - j) Mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran;
 - k) Membuat register SPP, SPM, penolakan penerbitan SPM, penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ;
 - l) Membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/surat perintah kerja, daftar realisasi pembayaran kontrak dan realisasi pembayaran per nomor kontrak;
 - m) Membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi;
 - n) Mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
 - o) Secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas melaporkan kepada BUD serta PA;
 - p) Penyiapan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan;
 - q) Menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran; dan
 - r) Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan supervisi, serta evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b) Penyusunan rencana kegiatan operasional bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perlindungan sosial korban bencana alam;
- d) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam;
- e) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang jaminan sosial;
- f) Pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

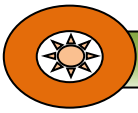


- g) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam; jaminan sosial dan pemutakhiran DTKS;
- h) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam; jaminan sosial dan pemutakhiran DTKS;
- i) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam; jaminan sosial dan pemutakhiran DTKS;
- j) membagi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi kegiatan bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam, jaminan sosial dan pemutakhiran DTKS;
- k) Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai pada bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- l) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas dan fungsi bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam; jaminan sosial dan pemutakhiran DTKS; dan
- m) Melaporkan hasil kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam; perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam, jaminan sosial dan pemutakhiran DTKS kepada atasan.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; pemberian bimbingan teknis; pemantauan dan supervisi, serta evaluasi di bidang rehabilitasi sosial. Dalam melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- b) Penyusunan rencana kegiatan operasional bidang rehabilitasi sosial;
- c) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial anak termasuk balita terlantar, anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak penyandang disabilitas, dan anak korban kekerasan;
- d) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar;
- e) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial termasuk gelandangan dan pengemis, korban penyalahgunaan narkoba, tuna susila, eks nabi, eks psikotik, orang dengan HIV/AIDS;
- f) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- g) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial korban kekerasan;
- h) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial balita terlantar, anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak penyandang disabilitas, dan anak korban kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, gelandangan, pengemis, korban penyalahgunaan narkoba, tuna susila, eks nabi, eks psikotik, orang dengan HIV/AIDS dan korban kekerasan;

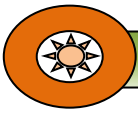


- i) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang rehabilitasi sosial balita terlantar, anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak penyandang disabilitas, dan anak korban kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, korban penyalagunaan napza, tuna susila, eks napi, eks psikotik , orang dengan HIV/AIDS dan korban kekerasan;
- j) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang balita terlantar, anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak penyandang disabilitas, dan anak korban kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, korban penyalagunaan napza, tuna susila, eks napi, eks psikotik , orang dengan HIV/AIDS dan korban kekerasan;
- k) Membagi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi kegiatan bidang rehabilitasi sosial balita terlantar, anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak penyandang disabilitas, dan anak korban kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, korban penyalagunaan napza, tuna susila, eks napi, eks psikotik , orang dengan HIV/AIDS dan korban kekerasan;
- l) Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dibidang rehabilitasi sosial;
- m) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial balita terlantar, anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak penyandang disabilitas, dan anak korban kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, korban penyalagunaan napza, tuna susila, eks napi, eks psikotik , orang dengan HIV/AIDS dan korban kekerasan; dan
- n) Melaporkan hasil kegiatan rehabilitasi sosial balita terlantar, anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak penyandang disabilitas, dan anak korban kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, korban penyalagunaan napza, tuna susila, eks napi, eks psikotik , orang dengan HIV/AIDS dan korban kekerasan kepada atasan.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas mempunyai tugas perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; pemberian bimbingan teknis; pemantauan dan supervisi, serta evaluasi dibidang pemberdayaan sosial. Dalam melaksanakan tugas, bidang pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan rumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial;
- b) Penyusunan rencana kegiatan operasional bidang pemberdayaan sosial;
- c) Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial keluarga miskin dan kelompok rentan;
- d) Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana dan bantuan sosial;

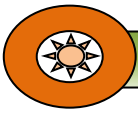


- e) Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- f) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber dana dan bantuan sosial, pemberdayaan keluarga miskin dan kelompok rentan; penanaman dan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- g) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber dana dan bantuan sosial, pemberdayaan keluarga miskin dan kelompok rentan; penanaman dan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- h) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber dana dan bantuan sosial, pemberdayaan keluarga miskin dan kelompok rentan; penanaman dan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- i) Membagi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber dana dan bantuan sosial, pemberdayaan keluarga miskin dan kelompok rentan; penanaman dan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- j) Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana dan bantuan sosial; pemberdayaan keluarga miskin dan kelompok rentan; penanaman dan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- k) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber dana dan bantuan sosial, pemberdayaan keluarga miskin dan kelompok rentan; penanaman dan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
- l) Melaporkan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber dana dan bantuan sosial, pemberdayaan keluarga miskin dan kelompok rentan; penanaman dan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial kepada atasan.

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bidang penanganan fakir miskin mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan yang dilaksanakan bidang penanganan fakir miskin dan memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas kedinasan bidang penanganan fakir miskin. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a) Perencanaan operasional perumusan program kerja di bidang penanganan fakir miskin sesuai dengan program utama yang telah ditetapkan atas kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

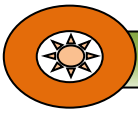


- b) Pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan/program kerja yang dilakukan oleh bidang penanganan fakir miskin berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan bidang pemberdayaan sosial sesuai peraturan perundang undangan dan standar operasional prosedur agar tertib dan disiplin dalam pelaksanaan tugas kesalahan;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di bidang penanganan fakir miskin secara berkala sesuai dengan peraturan perundang undangan dan sop yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang penanganan fakir miskin dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- f) Membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang penanganan fakir miskin sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai laporan pertanggung jawaban dan akuntabilitas;
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai fungsi yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;
- h) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
- i) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
- j) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
- k) Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan provinsi;
- l) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin; dan
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang penanganan fakir miskin, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Bidang kependudukan dan pencatatan sipil melaksanakan tugas urusan Pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil, menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan penyusunan perencanaan, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran, bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, pengelolaan dokumen pencatatan sipil serta monitoring, evaluasi dan dokumentasi dan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta

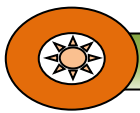


- kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran dan di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, pengelolaan dokumen pencatatan sipil serta monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - c) pelaksanaan pembinaan umum, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran, di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di kabupaten/kota ;
 - d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran serta di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota;
 - e) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran, di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota dan pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
 - f) Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
 - g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di kabupaten/kota.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber daya perangkat daerah merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan urusan



pemerintahan bidang sosial serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dukungan teknologi informasi, serta fasilitas pelayanan menjadi modal dasar dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data kepegawaian bulan Maret Tahun 2026, jumlah aparatur pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo sebanyak **159 orang**, yang terdiri atas pejabat struktural, pejabat fungsional, pelaksana, dan PPPK Paruh Waktu serta Outsourcing yang tersebar pada bidang-bidang sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

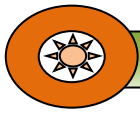
Dengan adanya penggabungan urusan sosial dan administrasi kependudukan serta pencatatan sipil dalam satu perangkat daerah, kebutuhan kompetensi aparatur menjadi semakin beragam. Aparatur dituntut memiliki kemampuan dalam bidang kesejahteraan sosial, pengelolaan data sosial, pelayanan administrasi kependudukan, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan basis data, serta pelayanan publik yang responsif terhadap kelompok rentan.

Dari sisi kuantitas, jumlah SDM yang tersedia telah mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Namun demikian, hasil analisis kebutuhan menunjukkan masih diperlukan penguatan kapasitas dan pemerataan kompetensi aparatur, terutama pada jabatan fungsional teknis yang mendukung pelayanan sosial, pengelolaan data kependudukan, analisis kebijakan, pengelolaan sistem informasi, serta pendampingan kelompok rentan. Selain itu, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan menjadi kebutuhan untuk menjawab tuntutan pelayanan yang semakin kompleks dan berbasis digital. Adapun klasifikasi pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2026

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	SD	0	0	0
2	SLTP	2	0	0
3	SLTA	33	14	47
4	D1/DIII	0	3	3
5	D IV/S1	46	46	92
6	S2	9	6	15
	Jumlah	90	69	159

Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian Bulan Maret Tahun 2026

**Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat /Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2026**

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pembina Utama (IV/d)	1	0	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	4	1	5
3	Pembina (IV/a)	4	3	7
4	Penata Tk I (III/d)	20	21	41
5	Penata (III/c)	3	3	6
6	Penata Muda Tk I (III/b)	3	10	13
7	Penata Muda (III/a)	4	2	6
8	Pengatur Muda Tk I (II/d)	3	1	4
9	Pengatur (II/c)	2	1	3
10	Pengatur Tk I (II/b)	2	0	2
11	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
Jumlah		46	42	88

Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian Bulan Maret Tahun 2026

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin Tahun 2026

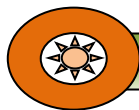
No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pejabat Eselon II	1	0	1
2	Pejabat Eselon III	3	2	5
3	Pejabat Eselon IV	1	1	2
Jumlah		5	3	8

Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian Bulan Maret Tahun 2026

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional dan Jenis Kelamin Tahun 2026

No	Jabatan Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Fungsional Perencana	1	0	1
2	Fungsional Pekerja Sosial	4	6	10
3	Fungsional Analis Kebijakan	2	0	2
4	Fungsional Database Kependudukan Ahli Muda	3	0	3
5	Fungsional Umum	30	34	64
6	PPPK Paruh Waktu	28	25	53
7	Outsourcing	16	2	18
Jumlah		84	67	151

Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian Bulan Maret Tahun 2026

**Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Penyandang Disabilitas**

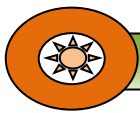
No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pelaksana	1	0	1
2	PPPK Paruh Waktu	1	0	1
Jumlah		2	0	2

Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian Bulan Maret Tahun 2026

b. Sarana dan Prasarana

Tabel 2.6.
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Sosial
Tahun 2026

No	Jenis Barang	Kondisi		Jumlah/Luas
		Baik	Rusak	
1	Tanah Bangunan Kantor	843 m2	-	843 m2
2	Tanah Bangunan Kantor	4.861 m2	-	4.861 m2
3	Tanah Bangunan Kantor	1.194 m2	-	1.194 m2
4	Mobil Dapur Umum Lapangan	2 unit	1	3 unit
5	Mobil Truck	1 unit	-	1 unit
6	Mobil Tangki Air	1 unit	1	2 unit
7	Perahu Dolphin	3 unit	-	3 unit
8	Perahu karet	2 unit	-	2 unit
9	Motor Rescue	2 unit	1	2 unit
10	Mobil UPSK	-	2 unit	2 unit
11	Tower Crane	1 unit	1	1 unit
12	Station Wagon	7 unit	-	5 unit
13	Sepeda motor	11 unit	-	6 unit
14	Reciver	1 unit	-	1 unit
15	Lemari kayu	35 unit	-	35 unit
16	Lemari Besi	8 unit	-	8 unit
17	Rakbesi	2 unit	-	2 unit
18	Tempat Tidur	35 unit	-	35 unit
19	Kasur Busa	25 unit	-	25 unit
20	Meja Makan	2 unit	-	2 unit
21	Mixer	2 unit	-	2 unit
22	Kompore Gas	1 unit	-	1 unit
23	Mesin cuci	3 unit	-	3 unit
24	Rak kayu	1 unit	1	1 unit
25	Display	2 unit	1	2 unit
26	Alat Kantor lainnya	1 unit	-	1 unit
27	Komputer	30 unit	2	5 unit
28	AC	22 unit	10	12 unit
29	Meja kayu	51 unit	10	51unit
30	Meja rapat	2 unit	-	2 unit
31	Meja resepsionis	1 unit	1	1 unit
32	Kursi rapat	150 unit	30	150 unit
33	Laptop	20 unit	5	20 unit
34	Brankas	1 unit	-	1 unit
35	Televisi	6 unit	-	4 unit



36	Printer	9 unit	-	9 unit
37	Camera Digital	3 unit	1	3 unit
38	Infocus	3 unit	-	3 unit
39	Kipas Angin	3 unit	3	3 unit
40	Kulkas	2 unit	-	3 unit
41	CCTV	3 unit		3 unit
42	Scanner	2 unit		2 unit
43	Power Suplay	1 unit		1 unit
44	Mic Wireless	2 unit		2 unit
45	Gorden	3 unit	2 unit	3 unit
46	Kipas Angin	25 unit		25 unit

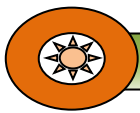
Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian Bulan Maret Tahun 2026

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan publik, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo telah memiliki sarana dan prasarana perkantoran, kendaraan operasional, peralatan kerja, serta fasilitas pelayanan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan yang memerlukan perhatian dalam periode perencanaan mendatang.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah belum optimalnya ketersediaan perangkat teknologi kerja berupa komputer personal (PC) dan laptop yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas seluruh aparatur. Keterbatasan perangkat kerja tersebut berdampak pada efektivitas pengelolaan data, kecepatan pelayanan administrasi, pelaksanaan pelaporan berbasis elektronik, serta integrasi sistem informasi yang menjadi kebutuhan utama dalam penyelenggaraan urusan sosial dan administrasi kependudukan.

Selain itu, pada urusan sosial masih terdapat keterbatasan fasilitas pelayanan berupa **belum tersedianya panti sosial milik pemerintah provinsi** yang dapat digunakan sebagai sarana rehabilitasi sosial, penampungan sementara, maupun pelayanan terpadu bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kondisi ini berpengaruh terhadap optimalisasi pelayanan dan penanganan kelompok rentan yang memerlukan intervensi secara langsung dan berkelanjutan, seperti penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus, korban kekerasan, maupun kelompok rentan sosial lainnya.

Oleh karena itu, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, termasuk pengadaan perangkat teknologi kerja dan pengembangan fasilitas pelayanan sosial secara bertahap, menjadi salah satu prioritas dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.



Secara keseluruhan, kondisi sumber daya perangkat daerah saat ini telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kebutuhan yang perlu dipenuhi secara bertahap, terutama terkait peningkatan kapasitas SDM, pemenuhan perangkat teknologi informasi, penguatan infrastruktur pelayanan, serta penyediaan fasilitas pelayanan sosial bagi kelompok rentan. Pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan daerah selama periode Renstra.

Faktor lain yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sumber daya anggaran. Sumber Daya Anggaran digunakan sesuai rencana dan prioritas program, menganut proporsi belanja sebagaimana ketentuan Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu 70 : 30 (belanja langsung masyarakat 70 % dan belanja tidak langsung 30%). APBD Dinas Sosial, Dukcapil Provinsi Gorontalo yang digunakan selang tahun 2023-2025 adalah sebagai berikut :

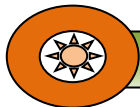
Tabel 2.7. Alokasi APBD pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2025

No	Tahun Anggaran	Urusan Sosial	Urusan Dukcapil
1	2020	5.459.558.189	292.529.000
2	2021	32.750.937.980	1.135.344.704
3	2022	25.653.548.061	152.840.323
4	2023	34.443.151.920	774.530.000
5	2024	26.592.018.017	582.592.500
6	2025	22.897.897.120	428.934.000

Sumber Data : Subag Keuangan Tahun 2026

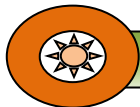
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo

Gambaran pencapaian kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo dapat diuraikan sebagai berikut.

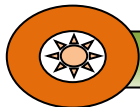


Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2025

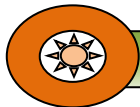
NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA OPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2020	2021	2022	2023	2025	2020	2021	2022	2023	2025	2020	2021	2022	2023	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
URUSAN PENUNJANG																			
1	Indek Kepuasan Masyarakat				-	-	BB	BB	B	-	-	BB	BB	A-	-	-	100%	100%	100%
2	Persentase layanan administrasi, sarana prasarana, SDM Aparatur serta perencanaan dan pelaporan				85%	85%	70%	100%	100%	85%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
URUSAN SOSIAL																			
1	Persentase warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial			IKU	65%	65%	70%	10%	11%	75%	100%	100%	8,39%	43%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase PSKS perorangan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial				83%	85%	90%	100%	65%	68%	88%	87,25 %	100%	100%	78%	100%	96,94 %	100%	100%
3	Persentase PSKS kelembagaan sosial yang aktif dalam penyelenggaraan sosial				-	-	90%	100%	100%	-	-	87,25 %	100%	100%	-	-	96,94 %	100%	100%



4	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan UGB/PUB yang tertib aturan				-	-	90%	100%	50%	-	-	87,25 %	100%	50%	-	-	96,94 %	100%	100%
5	Persentase warga Negara migran korban tindak kekerasan yang dilayani				-	-	100%	100%	100%	-	-	84,31 %	33.3%	37,5%	-	-	84.31 %	33.3%	37.5%
6	Persentase penyandang disabilitas yang meningkat keberfungsian sosialnya	√	√		100%	100%	100%	100%	100%	75%	88%	80%	100%	40%	75%	88%	80%	100%	40%
7	Persentase anak terlantar yang meningkat keberfungsian sosialnya	√	√		100%	100%	100%	100%	100%	75%	88%	100%	100%	100%	75%	88%	100%	100%	100%
8	Persentase lanjut usia terlantar yang meningkat keberfungsian sosialnya	√	√		100%	100%	100%	100%	100%	75%	88%	100%	100%	100%	75%	88%	100%	100%	100%
9	Persentase gelandangan dan pengemis yang meningkat keberfungsian sosialnya	√	√		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Persentase PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang meningkat keberfungsian sosialnya				87%	88%	100%	100%	100%	75%	88%	100%	100%	100%	86%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase anak yang mendapatkan orang tua angkat secara sah secara hukum				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	85%	-	-	100%	100%	85%
12	Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat aksesnya dalam menerima pemenuhan kebutuhan dasar				35.000 KPM	40.000 KPM	45.000 KPM	10.000 KPM	10.000 KPM	154.64 0 KPM	90.000 KPM	45.000 KPM	10.000 KPM	23.000 KPM	441%	225%	100%	100%	230%
13	Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat produktifitas sosial ekonominya				80 KK	270 KK	70%	500 KK	500 KK	270 KK	270 KK	100%	2995 KK	524 KK	100%	100%	100%	599%	104%
14	Jumlah Fakir miskin yang mampu mengembangkan bantuan stimulant				-	-	-	-	20 ORG	-	-	-	-	15 ORG	-	-	-	-	75%

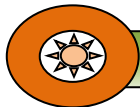


15	Persentase lembaga pemerintah/non pemerintah yang memnfaatkan DTKS dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan				-	-	-	-	35%	-	-	-	-	35.5%	-	-	-	-	100%
16	Persentase lembaga pemerintah/non pemerintah yang memnfaatkan DTKS dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan				-	-	-	-	35%	-	-	-	-	35.5%	-	-	-	-	100%
17	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani dan terlayani	√	√		95%	95%	95%	1000 ORG	1200 ORG	85%	100%	94,57 %	270 ORG	54.094 ORG	89%	100%	99,54 %	27%	100%
18	Persentase taman makam pahlawan yang meningkat fungsinya sebagai media pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial				-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																			
19	Persentase peningkatan SKPD Provinsi yang memanfaatkan data Kependudukan	-	-	-	60%	-	-	-	-	29%	-	-	-	-	48%	-	-	-	-
20	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	-	-	-	-	2 Kali	2 Kali	-	-	-	2 Kali	2 Kali	-	-	-	100%	100%	-	-
21	Presentase kepemilikan dokumen kependudukan	-	-	-	-	-	-	100%	99%	-	-	-	99,71 %	99,46 %	-	-	-	99,71	100%



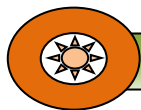
Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo

No.	Program	Jlh Keg	2021 (Rp.)		2022 (Rp.)		2023 (Rp.)		2024 (Rp.)		2025 (Rp)	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Urusan Sosial												
1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	6	3.094.863.649	2.868.320.116	3.226.028.365	3.100.194.142	9.853.037.275	9.308.414.075	11.588.058.797	11.061.630.015	11.391.186.241	10.460.364.938
2	Program Pemberdayaan Sosial	2	1.601.453.073	1.445.077.650	1.481.208.610	1.453.231.508	1.951.447.960	1.930.319.961	1.801.075.135	1.791.395.615	1.129.666.431	953.918.207
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1	166.850.544	131.274533	166.834.759	140.662.020	152.640.000	131.652.788	128.602.000	119.102.510	115.831.850	101.280.625
4	Program Rehabilitasi Sosial	4	3.991.254.238	3.890.507.680	3.623.564.146	3.517.975.541	2.527.508.051	2.464.008.214	3.305.663.720	2.922.490.993	3.058.442.942	2.922.945.108
5	Program Perlindungan dan jaminan Sosial	2	19.512.254.501	18.718.520.689	12.164.687.470	10.898.182.932	17.985.477.049	17.929.836.555	8.080.394.875	8.001.348.674	5.577.580.656	5.391.147.169
6	Program Penanganan Bencana	1	628.940.205	625.638.041	727.339.231	723.174.621	1.081.616.785	512.260.075	1.087.432.140	1.016.931.963	1.171.422.500	864.572.766
7	Program Pengelolaan taman Makam Pahlawan	1	839.095.036	838.078.084	775.770.856	763.141.078	891.424.800	882.030.345	600.791.350	598.948.680	453.766.500	430.263.568



No.	Program	Jlh Keg	20201(Rp.)		2022 (Rp.)		2023 (Rp.)		2024 (Rp.)		2025 (Rp)	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Program Pendaftaran Penduduk	1	67.307.500	67.299.050	152.840.323	152.614.860	199.530.000	198.971.300	113.892.500	113.780.200	92.020.000	91.727.035
3	Pencatatan Sipil	1	1.035.416.485	1.029.912.310	-	-	150.000.000	149.982.300	139.788.750	139.677.891	111.332.000	108.981.696
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	32.620.719	32.610.050	-	-	425.000.000	424.836.951	328.931.250	325.890.717	242.526.000	206.363.465



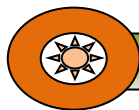


Dari Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 diketahui bahwa pada tahun ke 2 periode rentra terdapat kenaikan alokasi anggaran pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Seiring dengan kenaikan tersebut maka jangkauan pelayanan perangkat daerah pun mengalami peningkatan. Kenaikan paling besar terjadi pada program perlindungan dan jaminan sosial di kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, dimana terjadi kenaikan pada capaian kinerja pelayanan lebih dari 100 %. Namun pada tahun 3 sampai anggaran pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mengalami penurunan. Penurunan terjadi sebagai karena imbas dari pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Provinsi Gorontalo, sehingga pemerintah mengambil kebijakan refocussing anggaran, hal ini menyebabkan sebagian besar kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun ke 4 dimana keadaan sudah mulai membaik dan Dinas Sosial memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar dan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin dan rentan dengan jangkauan pelayanan sebanyak 10.000 KPM yang disalurkan dalam 1 tahun 4 kali dan kegiatan pemberdayaan fakir miskin dengan memberikan bantuan stimulant usaha yang ditargetkan 500 KK tetapi yang terealisasi melebihi dari target sebanyak 2995 KK dikarenakan adanya penambahan anggaran dari pemerintah untuk pemenuhan aspirasi masyarakat provinsi gorontalo.

Tabel 2.10

Data Penerima Bantuan Sosial Tahun 2021-2025

No	Jenis Bantuan Sosial	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	Usaha Ekonomi Produktif (UEP)/Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	270 KUBE			500	206	706	2372	623	2995	456	76	532	737		
2	Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G)	90.000			45.000			10.000 (4kali menerima)			21.549	1.451	23.000	6596	2404	9000
3	Korban Bencana Alam dan Sosial	28.400			13.279			2.046			54.094			6.659		
4	Disabilitas Terlantar	46			32			10	5	15	2	2	4	15	10	25
5	Anak Terlantar	36			35			22	38	60	29	23	52	24	21	45
6	Lanjut Usia Terlantar	23			23			7	16	23	7	16	23	26	29	55



7	Karang Taruna	10	10	37	20	6
8	Kelompok Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	22	49	0	64	0
9	Bantuan Sosial LKSA	10	6	2	3	15

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP)/ Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

Program ini ditujukan sebagai usaha untuk ekonomi produktif bagi masyarakat khususnya Perempuan sebagai Kepala rumah tangga sehingga program ini lebih spesifik kepada perempuan

2. Korban Bencana Alam dan Sosial

Program penanganan korban bencana alam dan social ditujukan kepada korban terdampak bencana alam dan social. Program ini menyasar ke seluruh masyarakat.

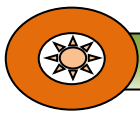
3. Karang Taruna, program ini sebagai upaya untuk memberdayakan pemuda menyasar para pemuda yang tergabung dalam organisasi karang taruna.

4. Kelompok Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), program ini sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan social berbasis masyarakat yang menyasar seluruh masyarakat yang tergabung pada WKSBM.

5. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar dilaksanakan sesuai kewenangan Dinas Sosial Provinsi yakni didalam panti.

Tabel 2.11
Rekapitulasi Capaian SPM Tahun 2020-2025

No	Jenis Layanan	Capaian						Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti sosial	92,8%	81,9%	100%	81,82%	96,36%	98,31%	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial	100%	100%	100%	83,33%	100%	100%	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti sosial	92,53%	100%	100%	98,33%	100%	100%	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan	0	0	0	0	100% (Surat Keterangan)	90%	



	pengemis didalam panti sosial							
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	100%	100%	100%	88,00%	96,00%	97,85%	
	Indeks Capaian SPM	77,06%	76,38%	80%	70,30%	98,47%	97,35%	

Sumber data : SPM Kemendagri

Capaian SPM Bidang urusan sosial di daerah provinsi terdiri atas mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti sosial.

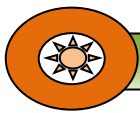
Pada Tahun 2020-2023 Pemerintah Provinsi Gorontalo belum memiliki Panti social terpadu disabilitas terlantar namun demikian bukan berarti Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara regular Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi pada tahun 2024 bulan September sudah mulai beroperasi “Rumah Disabilitas” dengan target 10 orang namun yang klien yang masuk dalam panti hanya 4 orang dan tidak semua jenis layanan terpenuhi, sehingga capaiannya masih dibawah target.

2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial.

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo belum memiliki panti social anak terlantar, Untuk mengantisipasi proses pendirian Panti Sosial Anak Terlantar sebagai layanan teknis Dinas Sosial Provinsi yang memerlukan waktu yang cukup panjang, maka Bidang Rehabilitasi Sosial mengupayakan proses layanan rehabilitasi sosial berbasis panti bekerja sama dengan LKSA milik masyarakat dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Kegiatan ini juga sudah memberikan hampir semua jenis mutu layanan, sehingga capaiannya setiap tahun 100%.

3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti sosial.

Untuk Lanjut Usia terlantar didalam panti dari tahun 2020 sampai dengan sekarang masih menyewa Gedung milik Pemerintah Kota Gorontalo dan dalam pelaksanaan tugas Dinas Sosial Provinsi Goronalo tetap memberikan pelayanan untuk 23 klien dalam panti. Sedangkan dalam jenis mutu layanan sudah hampir semua dilaksanakan, sehingga capaian rata-rata 100%.



4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti sosial.

Pada tahun 2020-2024 kegiatan ini tidak dilaksanakan karena dalam dokumen renstra tahun sebelumnya tidak dianggarkan dan belum memiliki panti social gelandangan dan pengemis. Pada tahun 2024 dinyatakan 100% karena melampirkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Panti yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, sehingga capaian bisa 100%.

6. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Pada tahun 2020-2022 untuk layanan ini sudah mencapai 100% dan juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dalam penanganan korban bencana. Namun pada tahun 2023-2024 mengalami penurunan realisasi di karenakan dari 5 jenis mutu layanan masih ada 1 mutu layanan yang tidak terlaksana, yaitu kegiatan Layanan Dukungan Psikososial {LDP}.

Layanan Dukungan Psikososial tidak terlaksana dikarenakan beberapa hal, diantaranya

1. Kondisi pengungsian yang bersifat tidak tetap dan tidak terkumpul pada 1 titik Pengungsian {warga yang terdampak bencana tidak mau diungsikan ke Lokasi pengungsian dan tetap bertahan di rumah dengan alasan menjaga rumah dan harta benda
2. Penanganan masih berfokus pada tahap awal bencana yaitu masih diarahkan pada distribusi logistik. pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan darurat dan pemulihan kondisi dasar masyarakat terdampak.
3. Karena beberapa alasan tersebut diatas, maka pada tahun 2023-2025 realisasi tidak mencapai 100 %.

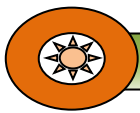
Tabel 2.12

Capaian Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) Tahun 2024-2025

Provinsi Gorontalo

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	51,92	52,23	51,92	99,40	Maju

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Indikator Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) pada tahun 2025 ditargetkan mencapai nilai 52,23



dengan satuan indeks. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi yang dicapai sebesar 51,92, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 99,40% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai target, selisih yang terjadi relatif kecil yaitu sebesar 0,31 poin indeks, sehingga kinerja indikator ini dapat dikategorikan baik dan berada pada kategori Maju. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan sosial masyarakat telah mengalami perkembangan yang positif, yang tercermin dari semakin baiknya akses masyarakat terhadap layanan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan keberfungsian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih optimal melalui penguatan program perlindungan dan pemberdayaan sosial agar target IKESOS dapat tercapai secara penuh pada tahun berikutnya.

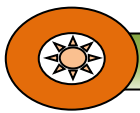
Tabel 2.13
Data Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2021 - 2025

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
GORONTALO	405.098	411.387	418.244	423.981	428.370
BOALEMO	148.550	149.770	151.609	152.851	154.108
BONE BOLANGO	167.102	168.671	172.301	174.788	176.320
POHUWATO	152.369	155.693	160.187	162.989	165.752
GORONTALO UTARA	125.816	127.580	130.400	131.991	133.537
KOTA GORONTALO	201.728	202.286	204.444	204.360	205.318
JUMLAH	1.200.663	1.215.387	1.237.185	1.250.960	1.263.405

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Berdasarkan data Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Provinsi Gorontalo meningkat dari 1.200.663 jiwa pada tahun 2021 menjadi 1.263.405 jiwa pada tahun 2025 atau bertambah sebanyak 62.742 jiwa selama lima tahun terakhir.

Kabupaten Gorontalo merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sebanyak 428.370 jiwa pada tahun 2025 atau sekitar 33,91 persen dari total penduduk Provinsi Gorontalo. Selanjutnya Kota Gorontalo memiliki jumlah penduduk sebesar 205.318 jiwa, Kabupaten Bone Bolango sebanyak 176.320 jiwa,



Kabupaten Pohuwato sebanyak 165.752 jiwa, Kabupaten Boalemo sebanyak 154.108 jiwa, dan Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 133.537 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk tersebut memberikan implikasi terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan, khususnya dalam penyediaan pelayanan pendaftaran penduduk, penerbitan dokumen kependudukan, pemanfaatan data kependudukan, serta implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Bertambahnya jumlah penduduk juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat, dan terintegrasi.

Dalam rangka mendukung tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo perlu terus memperkuat fungsi koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota. Selain itu, peningkatan kualitas data kependudukan yang akurat dan mutakhir menjadi faktor penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, pelayanan publik, serta penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data.

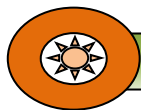
Tabel 2.14
Capaian Presentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Provinsi Gorontalo

Uraian/Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Ditjen Dukcapil Kemendagri

Berdasarkan hasil pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan selama periode Tahun 2021–2025, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Indikator kinerja berupa ****Laporan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan**** berhasil mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Target kinerja sebesar 100 persen dapat direalisasikan secara penuh pada Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025 sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa fungsi fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan



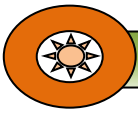
kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan mencakup dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk, penerbitan dokumen kependudukan, pemanfaatan data kependudukan, implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), serta penguatan kebijakan administrasi kependudukan di daerah.

Capaian kinerja yang konsisten selama lima tahun berturut-turut tersebut menjadi modal penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan di Provinsi Gorontalo. Ke depan, upaya fasilitasi akan terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian target nasional administrasi kependudukan, khususnya peningkatan Indeks Kualitas Layanan (IKL) Dukcapil, perluasan pemanfaatan data kependudukan, serta percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Tabel 2.15
Capaian Layanan Administrasi Kependudukan
Provinsi Gorontalo Tahun 2025

NO	CAPAIAN LAYANAN	TARGET	CAPAIAN
1	PEREKAMAN KTP	99,40%	98,06%
2	AKTA KELAHIRAN	99%	99,85%
3	KIA	60%	67,07%
4	PKS	5 OPD	1 OPD
5	AKSES DATA	5 OPD	1 OPD
6	AKTA KEMATIAN	100%	100%
8	AKTA KAWIN	100%	100%
9	AKTA CERAH	100%	100%
10	IKD	30%	14,67%

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri



Berdasarkan hasil pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan Tahun 2025, secara umum capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

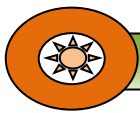
Pada indikator cakupan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) ditargetkan sebesar 99,40%, sedangkan realisasi mencapai 98,06%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk wajib KTP telah melakukan perekaman biometrik, namun masih diperlukan upaya percepatan pelayanan kepada penduduk yang berada di wilayah terpencil, kelompok rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan administrasi kependudukan.

Pada indikator kepemilikan Akta Kelahiran, realisasi mencapai 99,85%, melampaui target sebesar 99%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan pencatatan kelahiran di Provinsi Gorontalo telah berjalan dengan sangat baik melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, fasilitas kesehatan, serta instansi terkait dalam mendukung percepatan kepemilikan dokumen kependudukan sejak dini.

Selanjutnya, indikator Kartu Identitas Anak (KIA) juga menunjukkan kinerja yang positif. Dari target sebesar 60%, realisasi mencapai 67,07%. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat serta optimalisasi pelayanan jemput bola di sekolah maupun pelayanan terpadu yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pada aspek pemanfaatan data kependudukan, indikator Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan baru terealisasi sebanyak 1 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari target 5 OPD. Demikian pula pada indikator Akses Data Kependudukan, realisasi baru mencapai 1 OPD dari target 5 OPD. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan integrasi layanan pemerintahan masih perlu ditingkatkan melalui perluasan kerja sama lintas sektor, peningkatan pemahaman OPD terhadap manfaat data kependudukan, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi.

Sementara itu, indikator pelayanan pencatatan sipil yang meliputi Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian masing-masing berhasil mencapai



target 100%, yang menunjukkan bahwa pelayanan pencatatan peristiwa penting telah terlaksana secara optimal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Adapun pada indikator Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), realisasi baru mencapai 14,67% dari target 30%. Rendahnya capaian ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya tingkat literasi digital masyarakat, kepemilikan perangkat telepon pintar yang kompatibel, keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, serta masih perlunya peningkatan sosialisasi mengenai manfaat dan tata cara aktivasi IKD.

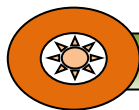
Secara keseluruhan, capaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pelayanan dasar telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, khususnya pada pelayanan pencatatan sipil dan kepemilikan dokumen kependudukan. Namun demikian, masih diperlukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan cakupan perekaman KTP-el, mempercepat implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui peningkatan jumlah kerja sama dan akses data bagi perangkat daerah maupun instansi pengguna. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola administrasi kependudukan yang modern, terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan nasional dan daerah.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam konteks penyusunan Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029, kelompok sasaran layanan dapat dikelompokkan berdasarkan dua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah, yaitu urusan sosial dan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka kelompok sasaran layanan antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.13. Kelompok Sasaran Layanan

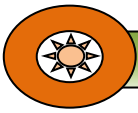
No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran	Jumlah
Urusan Sosial				
1	Bidang Pemberdayaan Sosial	- Bantuan Karang Taruna - Penguatan Kapasitas Bimbingan Teknis	- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) - Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) - Taruna Siaga Bencana (TAGANA) - Lembaga Kesejahteraan Sosial	- 77 TKSK - 189 PSM - 829 Tagana - 10 LKS - 48 LKSA - 96 KT



			(LKS) - Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Karang Taruna	
2	Bidang Penanganan Fakir Miskin	- Bantuan Usaha Ekonomi Produktif/Wanita Rawan Sosial Ekonomi (UEP/WRSE) - Pemberian Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G)	- Fakir Miskin Desil 1-4 Yg Ada Usaha Dgn Yg Sudah Kawin (diambil 10% dari total 62712 Dgn perhitungan sebagian sudah dapat bantuan dari pusat, kab/kota, skpd lain) - Fakir Miskin (Desil 1-4 Lansia, Disabilitas Berat)	- 6271 Orang - 24714 Orang
3	Bidang Rehabilitasi Sosial	- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas didalam Panti - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar didalam Panti - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis didalam Panti	- Disabilitas Terlantar - Anak Terlantar - Lanjut Usia Terlantar - Gelandangan dan Pengemis	- 1648 Penyandang disabilitas - 303 Anak - 1607 Lansia - 72 Gepeng
4	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Layanan Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	- Korban Bencana Alam dan Sosial	- 2000
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
5	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Penerbitan KTP-el, KK, akta kelahiran, dan lainnya - Untuk keperluan pendidikan dan beasiswa. - Yang memerlukan data NIK untuk layanan publik. - Yang membutuhkan data pemilih mutakhir berdasarkan data kependudukan. -	- Penduduk Provinsi Gorontalo secara umum, khususnya yang belum memiliki dokumen kependudukan - Penduduk rentan administrasi kependudukan, seperti kelompok lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat terpencil, dan masyarakat di daerah perbatasan/terpencil. - Pelajar dan mahasiswa, yang membutuhkan dokumen untuk keperluan pendidikan dan beasiswa. - Lembaga pengguna data kependudukan, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan instansi lainnya - Penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu.	- Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo per tanggal 31 Desember 2026 sejumlah 1.263.405 Jiwa - Penduduk rentan administrasi seperti lansia berjumlah 75.764 Jiwa - Pelajar Mahasiswa yang membutuhkan dokumen kependudukan berjumlah 726.711 Jiwa

Sumber : Bidang-Bidang Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan.



Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

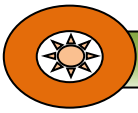
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait antara lain:

1. Dinas Sosial Kabupaten/Kota, dalam hal koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan
2. Kejaksaan Tinggi Gorontalo, dalam rangka pendampingan kegiatan.
3. Pengadilan Negeri Kab/Kota, dalam rangka Sidang Pengangkatan Anak (COTA) Calon Orang Tua Asuh.
4. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, dalam rangka pendataan UMKM.
5. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dalam rangka kepesertaan BPJS.
6. BPS Provinsi Gorontalo, pemanfaatan data (DTSEN)
7. Baznas, dalam hal Dukungan Program Bantuan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Gorontalo.
8. Lembaga-lembaga Sosial, dalam rangka membantu memaksimalkan pelaksanaan kegiatan bidang social.
9. Dinas Dukcapil di tingkat kabupaten/kota untuk pelaksanaan perekaman KTP-el, pencatatan kependudukan, pelayanan administratif Kependudukan.
10. Sekolah dan Madrasah / Satuan Pendidikan Termasuk pelajar pemula yang belum melakukan perekaman KTP El. Sekolah memiliki peran sebagai lokasi penyebaran informasi dan koordinasi agar siswa ikut perekaman.
11. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu / Pilukada, melakukan koordinasi dengan KPU untuk persiapan data pemilih, perekaman KTP El.
12. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
13. Himpunan Bank Negara (Himbara)

2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja (jika ada)

Dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo tidak hanya mengandalkan sumber pendanaan yang bersumber dari APBD, tetapi juga mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan melalui kemitraan pembangunan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dunia usaha, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, dan



berbagai pihak lainnya. Dukungan tersebut menjadi semakin penting mengingat kondisi fiskal daerah yang menuntut optimalisasi sumber daya pembangunan secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk kontribusi BUMD dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah adalah melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Program CSR memiliki potensi besar untuk mendukung pelaksanaan program kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan kelompok rentan, bantuan sosial, rehabilitasi sosial, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.

Melalui optimalisasi peran BUMD dan pemanfaatan Forum CSR Provinsi Gorontalo sebagai wadah kolaborasi pembangunan, diharapkan keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah dapat diimbangi dengan meningkatnya partisipasi dunia usaha dalam mendukung program-program sosial yang inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo.

2.1.7. Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

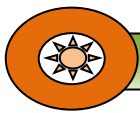
Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo melakukan kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo dalam hal Dukungan Program Bantuan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Gorontalo. Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pemberian bantuan bagi Penyandang Disabilitas terlantar di dalam Pant;
2. Pemberian bantuan bagi Lanjut Usia terlantar di dalam Pant;
3. Pemberian bantuan bagi Anak Yatim Piatu/Terlantar di dalam Pant;
4. Pemberian bantuan bagi Korban Bencana alam dan Bencana Sosial;
5. Pemberian bantuan bagi Perempuan Kepala Keluarga miskin dan rentan;
6. Pemberian bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar pada DTSEN.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

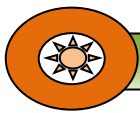
Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.



Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut :

Tabel 2.14 Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
A. Urusan Sosial			
1	Belum optimalnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan dan kerentanan sosial	Tingginya tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial yang memerlukan penguatan intervensi perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan kemiskinan secara terpadu dan tepat sasaran.	- Validitas data kemiskinan belum optimal, keterpaduan program penanggulangan kemiskinan masih terbatas, dan kapasitas pemberdayaan masyarakat miskin belum memadai.
2	Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan	Perlunya penguatan sistem perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat terhadap berbagai risiko sosial	- Cakupan perlindungan sosial belum optimal, koordinasi program perlindungan sosial belum terintegrasi, dan data penerima manfaat belum sepenuhnya akurat.
3	Belum optimalnya penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Belum optimalnya layanan rehabilitasi sosial dan dukungan sarana-prasarana pelayanan sosial dalam meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian PPKS	- Keterbatasan fasilitas pelayanan dan rehabilitasi sosial, belum tersedianya panti rehabilitasi sosial yang memadai, keterbatasan SDM pelayanan sosial, pendampingan pasca layanan belum optimal, serta dukungan pemberdayaan penerima manfaat masih terbatas.
4	Belum optimalnya perlindungan sosial bagi korban bencana	Perlunya peningkatan kapasitas penanganan korban bencana alam dan bencana sosial yang cepat, responsif, dan terintegrasi	- Kesiapsiagaan bencana belum optimal, keterbatasan logistik dan SDM, serta koordinasi penanganan bencana sosial masih perlu diperkuat.
5	Belum optimalnya penanganan tuna sosial dan penyimpangan perilaku sosial.	- Meningkatnya permasalahan tuna sosial dan penyimpangan perilaku sosial	- Faktor kemiskinan, disfungsi keluarga, rendahnya pengawasan sosial, serta terbatasnya program pembinaan dan rehabilitasi sosial.
6	Belum optimalnya tata kelola data sosial dan data sosial-ekonomi untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	- Belum optimalnya kualitas, pemutakhiran, dan pemanfaatan DTSEN serta data sosial-ekonomi sebagai dasar penetapan sasaran program perlindungan sosial, bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanggulangan kemiskinan	- Validitas dan pemutakhiran data belum optimal, integrasi data sosial antar sektor belum berjalan efektif, kapasitas pengelolaan data masih terbatas, serta pemanfaatan DTSEN dalam perencanaan dan evaluasi program belum optimal.
B. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	- Belum optimalnya kualitas dan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan	- Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan; ketersediaan blangko KTP-el yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelayanan, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi pelayanan digital, serta masih adanya kesenjangan kualitas layanan antarwilayah.
2	Belum optimalnya transformasi digital	- Masih rendahnya cakupan aktivasi dan pemanfaatan	- Rendahnya pemahaman dan literasi digital masyarakat; belum



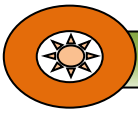
	pelayanan administrasi kependudukan	Identitas Kependudukan Digital (IKD)	optimalnya sosialisasi dan edukasi terkait IKD; keterbatasan akses perangkat digital pada sebagian kelompok masyarakat; serta belum optimalnya integrasi IKD dalam berbagai layanan publik.
3	Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan daerah	- Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan pengambilan kebijakan	- Belum seluruh perangkat daerah dan lembaga pengguna melakukan pemanfaatan data kependudukan secara optimal; masih terbatasnya perjanjian kerja sama pemanfaatan data; kapasitas pengelolaan dan analisis data belum merata; serta belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.
4	Belum optimalnya tata kelola data kependudukan yang terintegrasi	- Belum optimalnya integrasi dan interoperabilitas data kependudukan dengan sistem informasi sektoral	- Belum terbangunnya interoperabilitas sistem informasi secara menyeluruh; perbedaan standar dan struktur data antarinstansi; keterbatasan infrastruktur teknologi informasi pendukung integrasi data; serta belum optimalnya implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.
5	Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	- Belum optimalnya pembinaan, koordinasi, pengawasan, dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota	- Belum meratanya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola adminduk; keterbatasan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala; belum optimalnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; serta masih adanya perbedaan kualitas pelayanan dan penerapan standar pelayanan adminduk antar daerah.

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2. Isu Strategis

2.2.2.1. Telaahan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 merupakan tahapan pertama pelaksanaan pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian visi



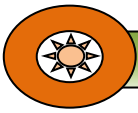
pembangunan Provinsi Gorontalo yang selaras dengan arah pembangunan nasional dan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2045. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya pada tujuan **Penurunan Kemiskinan dan Kesenjangan** serta **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**.

Pada tujuan **Penurunan Kemiskinan dan Kesenjangan**, Dinas Sosial berkontribusi terhadap sasaran daerah yaitu *“Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif.”* Sasaran tersebut menempatkan perlindungan sosial sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kerentanan sosial, serta mempercepat pengurangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Meskipun angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Gorontalo menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih diperlukan upaya yang lebih terarah dan terpadu untuk mencapai target pembangunan daerah dan nasional. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), persentase penduduk miskin ekstrem di Provinsi Gorontalo pada Maret 2024 tercatat sebesar 1,46 persen atau sekitar 17,41 ribu jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang memerlukan intervensi perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan kemiskinan secara berkelanjutan.

Dalam mendukung percepatan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, Dinas Sosial mengidentifikasi beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih tingginya jumlah masyarakat miskin dan rentan sosial, perlunya penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran, belum optimalnya kualitas dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), perlunya peningkatan kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta perlunya penguatan pemberdayaan sosial untuk meningkatkan kemandirian masyarakat miskin dan rentan.

Selain itu, Dinas Sosial juga memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu strategi pemerintah dalam memutus

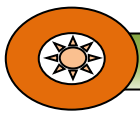


rantai kemiskinan antargenerasi melalui penyediaan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan validasi data sasaran, perlindungan sosial keluarga penerima manfaat, serta sinergi program penanganan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia.

Pada tujuan **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkontribusi terhadap sasaran daerah yaitu ***“Terwujudnya regulasi dan tata kelola pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian.”*** Dalam konteks ini, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas melalui penyediaan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

Beberapa isu strategis yang dihadapi dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil antara lain belum optimalnya kualitas dan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan, masih rendahnya cakupan aktivasi dan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), belum optimalnya integrasi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta perlunya penguatan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada kabupaten/kota.

Berdasarkan telaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 tersebut, isu strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan pada penguatan perlindungan sosial yang adaptif, terpadu, dan tepat sasaran; penguatan data kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan berbasis data terpadu; peningkatan kualitas pelayanan sosial dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial; penguatan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; penguatan integrasi dan pemanfaatan data kependudukan; serta pengembangan tata kelola administrasi kependudukan berbasis digital dan terintegrasi. Isu-isu strategis tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan.



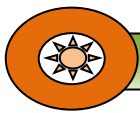
2.2.2.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan RPJMN 2025–2029

Tabel 2.15
Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

KEMENTERIAN SOSIAL RI 2025-2029	BIDANG SOSIAL
Penguatan data tunggal terintegrasi yang terupdate secara dinamis	Penguatan data kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan berbasis data terpadu yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
Kolaborasi dan integrasi program bersama pemerintah daerah	Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi program perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanggulangan kemiskinan dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan terkait.
Pengembangan care economy melalui perluasan pelibatan caregiver	Penguatan perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan melalui peningkatan peran keluarga, komunitas, dan pendamping sosial dalam layanan kesejahteraan sosial.
Kerjasama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan swasta, BUMN, dan filantropi	Penguatan kemitraan dan partisipasi dunia usaha, lembaga sosial, dan filantropi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Penguatan kompetensi dan tingkat kesejahteraan pilar sosial	Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial serta pilar-pilar sosial daerah.
Menjamin bantuan sosial tepat sasaran dan peranan kartu kesejahteraan	Penguatan perlindungan sosial yang adaptif, terpadu, dan tepat sasaran berbasis data terpadu.
Penguatan unit layanan sosial sebagai Centre Of Excellence	Peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial serta penguatan layanan rehabilitasi sosial.
Integrasi pemberdayaan KPM masyarakat lintas K/L	Penguatan pemberdayaan sosial dan peningkatan kemandirian keluarga penerima manfaat melalui integrasi program lintas sektor.
Penyediaan Pelayanan Pendidikan fakir miskin melalui Sekolah Rakyat	Dukungan penyelenggaraan Sekolah Rakyat melalui penguatan validasi data sasaran, pendampingan sosial, dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan rentan.

Kebijakan Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KEMENTERIAN DALAM NEGERI	BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI GORONTALO
Penguatan database kependudukan terpusat dan terintegrasi (SIK nasional)	Penguatan kualitas data kependudukan yang akurat, valid, dan terkini di kabupaten/kota
Penerapan NIK sebagai Single Identity Number untuk seluruh layanan publik	Pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung program pembangunan daerah
Percepatan perekaman dan penerbitan KTP-el serta aktivasi IKD	Fasilitasi dan monitoring percepatan perekaman KTP-el dan aktivasi IKD di kab/kota
Integrasi dan pemanfaatan data kependudukan lintas sektor	Koordinasi pemanfaatan data kependudukan dengan OPD dan instansi terkait
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi	Pembinaan dan pengawasan kualitas layanan



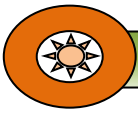
kependudukan	Dukcapil kab/kota
Penguatan kelembagaan dan SDM Dukcapil	Peningkatan kapasitas SDM Dukcapil kab/kota melalui bimtek dan sosialisasi
Pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan adminduk	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Dukcapil kab/kota
Penguatan inovasi pelayanan publik berbasis digital	Pengembangan inovasi layanan adminduk di tingkat daerah
Penyederhanaan layanan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM)	Pendampingan penerapan SPM bidang adminduk di kab/kota
Integrasi layanan adminduk dengan pelayanan publik lainnya	Koordinasi integrasi layanan adminduk dengan sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial

Berdasarkan hasil telaahan terhadap RPJMN Tahun 2025–2029, Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan Renstra Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, terdapat keterkaitan yang kuat antara arah kebijakan nasional dengan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029.

Pada urusan sosial, arah kebijakan nasional menitikberatkan pada penguatan perlindungan sosial yang adaptif, peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, penguatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas layanan sosial, serta penguatan peran pilar-pilar sosial dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kebijakan tersebut selaras dengan arah pembangunan daerah yang diarahkan pada penguatan perlindungan sosial yang tepat sasaran, peningkatan kualitas data penanganan kemiskinan, penguatan kelembagaan sosial, peningkatan kualitas layanan rehabilitasi sosial, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

Kebijakan nasional mengenai penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga sejalan dengan kebutuhan daerah dalam meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan. Oleh karena itu, penguatan kualitas data sosial dan pemanfaatannya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program menjadi salah satu fokus utama dalam Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029.

Selain itu, kebijakan Kementerian Sosial terkait penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat, integrasi pemberdayaan keluarga penerima manfaat, dan pengembangan ekonomi masyarakat miskin juga memiliki keterkaitan dengan upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dukungan daerah



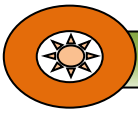
diarahkan melalui penguatan validasi data sasaran, perlindungan sosial keluarga miskin, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sinergi program lintas sektor.

Pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, arah kebijakan nasional berfokus pada penguatan sistem administrasi kependudukan nasional yang terintegrasi, pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal, percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, serta penguatan integrasi data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan berbasis data.

Arah kebijakan tersebut selaras dengan peran Pemerintah Provinsi Gorontalo yang lebih menitikberatkan pada fungsi pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo berfokus pada penguatan kualitas data kependudukan, peningkatan pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah dan instansi pengguna, percepatan aktivasi IKD, peningkatan kapasitas SDM Dukcapil kabupaten/kota, serta pengembangan inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital.

Meskipun terdapat perbedaan ruang lingkup kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, secara substansi kebijakan dan strategi yang dilaksanakan tetap memiliki keselarasan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perbedaan strategi yang diterapkan lebih disebabkan oleh karakteristik wilayah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, permasalahan pembangunan yang dihadapi, serta kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, hasil telaahan menunjukkan bahwa arah kebijakan dan strategi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 telah selaras dengan RPJMN Tahun 2025–2029, Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan Renstra Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Keselarasan tersebut menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029, khususnya dalam percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan perlindungan sosial yang inklusif, penguatan kualitas



pelayanan publik, serta pengembangan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis data.

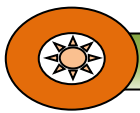
2.2.2.3. Telaahan Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 selaras dengan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan, memperhatikan aspek kewilayahan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029.

Berdasarkan hasil telaahan RTRW Provinsi Gorontalo, urusan sosial serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak memiliki dampak langsung terhadap perubahan pola ruang maupun struktur ruang wilayah. Namun demikian, penyelenggaraan pelayanan sosial dan pelayanan administrasi kependudukan perlu memperhatikan aspek pemerataan akses layanan bagi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, termasuk wilayah perdesaan, kawasan pesisir, daerah terpencil, daerah rawan bencana, serta wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar. Oleh karena itu, pengembangan pelayanan sosial dan administrasi kependudukan diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah melalui peningkatan aksesibilitas layanan, pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan jemput bola, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Dari aspek Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), isu pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah meliputi pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ketahanan sosial masyarakat terhadap bencana, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta penguatan pemanfaatan data untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Isu-isu tersebut memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan urusan sosial dan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.

Dalam perspektif KLHS, arah kebijakan urusan sosial difokuskan pada penguatan perlindungan sosial yang adaptif, terpadu, dan tepat sasaran; penguatan data kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan berbasis data terpadu; peningkatan kualitas pelayanan sosial dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial; penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial; serta



perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan secara inklusif. Kebijakan tersebut mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan penguatan ketahanan social.

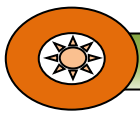
Sementara itu, pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, implementasi KLHS diwujudkan melalui penguatan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota, penguatan integrasi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan daerah, serta pengembangan tata kelola administrasi kependudukan berbasis digital dan terintegrasi. Upaya tersebut mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis data sebagai salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan sosial masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan bencana melalui penyelenggaraan perlindungan sosial adaptif, penanganan korban bencana, serta penyediaan data kependudukan yang akurat untuk mendukung respons kebencanaan, perencanaan pembangunan, dan penyaluran bantuan secara tepat sasaran.

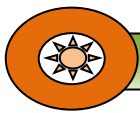
Dengan demikian, hasil telaahan RTRW dan KLHS menunjukkan bahwa arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 telah memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, mendukung pemerataan pelayanan publik, memperkuat ketahanan sosial masyarakat, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Tabel 2.16
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

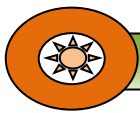
Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Masih terdapat masyarakat miskin dan kelompok rentan sosial yang belum memperoleh pelayanan sosial secara optimal	Kemiskinan dan kesenjangan sosial	Ketidakpastian ekonomi global	percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	masih adanya kantong-kantong kemiskinan dan kerentanan sosial di Gorontalo	Tingginya tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial yang memerlukan penguatan intervensi perlindungan sosial, pemberdayaan



						sosial, dan penanganan kemiskinan secara terpadu dan tepat sasaran
Perlindungan dan jaminan sosial	Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial	Penguatan ketahanan sosial masyarakat	Meningkatnya a risiko sosial dan ekonomi.	Reformasi perlindungan sosial	Tingginya kerentanan kelompok miskin dan rentan	Perlunya penguatan sistem perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat terhadap berbagai risiko sosial
Rehabilitasi Sosial	Belum optimalnya layanan rehabilitasi sosial dan keterbatasan sarana-prasarana pelayanan sosial bagi PPKS	Pembangunan inklusif dan peningkatan kualitas hidup kelompok rentan; pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial	Meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak-hak kelompok rentan, penyandang disabilitas, lansia, dan anak serta penguatan layanan sosial berbasis komunitas	Penguatan sistem rehabilitasi sosial, pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial, dan peningkatan akses pelayanan sosial bagi kelompok rentan	Keterbatasan fasilitas pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial, belum tersedianya panti rehabilitasi sosial yang memadai, serta meningkatnya kebutuhan layanan bagi PPKS di Provinsi Gorontalo	Belum optimalnya layanan rehabilitasi sosial dan dukungan sarana-prasarana pelayanan sosial dalam meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian PPKS
Penanganan Korban Bencana	Belum optimalnya kapasitas penanganan korban bencana	Ketahanan sosial dan pengurangan risiko bencana	Peningkatan frekuensi bencana akibat perubahan iklim	Peningkatan ketangguhan bencana	Provinsi Gorontalo merupakan wilayah rawan bencana alam	Perlunya peningkatan kapasitas penanganan korban bencana alam dan bencana sosial yang cepat, responsif, dan terintegrasi
Penanganan tuna sosial dan penyimpangan perilaku sosial	Meningkatnya jumlah dan kompleksitas permasalahan sosial	Ketahanan sosial dan pembangunan manusia	Perubahan sosial dan perkembangan teknologi informasi.	Meningkatnya tantangan sosial masyarakat perkotaan dan pedesaan	Meningkatnya permasalahan tuna sosial dan perilaku menyimpang	Meningkatnya Permasalahan Tuna Sosial dan Penyimpangan Perilaku Sosial
Pengelolaan data kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi data kemiskinan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya kualitas dan pemanfaatan data sosial-ekonomi sebagai dasar penetapan sasaran program sosial	Tata kelola data pembangunan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan inklusif	Peningkatan penggunaan data dan teknologi digital dalam kebijakan sosial berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>)	Implementasi DTSEN sebagai basis tunggal program perlindungan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan	Masih ditemukan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program sosial dan perlunya pemutakhiran data sosial-ekonomi secara berkelanjutan	Belum optimalnya kualitas, pemutakhiran, dan pemanfaatan DTSEN serta data sosial-ekonomi sebagai dasar penetapan sasaran program perlindungan sosial, bantuan sosial, pemberdayaan



					di Provinsi Gorontalo	sosial, dan penanggulangan kemiskinan secara tepat sasaran.
Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis digital	Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Transformasi digital pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perkembangan teknologi digital dan e-government	Transformasi digital pemerintahan dan reformasi birokrasi	Kualitas pelayanan adminduk antar wilayah masih belum merata	Belum optimalnya kualitas dan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan
Pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Rendahnya aktivasi dan pemanfaatan IKD oleh masyarakat	Digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan akses layanan	Percepatan digital identity dalam pelayanan publik	Implementasi IKD sebagai identitas digital nasional	Tingkat pemanfaatan IKD masyarakat Gorontalo masih rendah	Masih rendahnya cakupan aktivasi dan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan
Pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah dan lembaga pengguna	Penguatan tata kelola data pembangunan dan kebijakan berbasis data	Data driven government dan evidence based policy	Penguatan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik dan pembangunan	Pemanfaatan data kependudukan lintas perangkat daerah belum optimal	Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah, instansi pemerintah, dan lembaga pengguna untuk mendukung pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan kebijakan berbasis data
Pengelolaan sistem informasi kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya integrasi data kependudukan dengan sistem sektoral	Penguatan Satu Data Indonesia dan interoperabilitas data pemerintahan	Integrasi data dan interoperabilitas sistem informasi pemerintahan	Implementasi Satu Data Indonesia dan SPBE	Integrasi data kependudukan dengan sistem sektoral daerah masih terbatas	Belum optimalnya integrasi dan interoperabilitas data kependudukan dengan sistem informasi sektoral guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan pelayanan publik yang terintegrasi
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adminduk kabupaten/kota	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan adminduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota	Penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Peningkatan standar pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Penguatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adminduk secara nasional	Kapasitas dan kualitas pelayanan adminduk kabupaten/kota masih bervariasi	Masih perlunya penguatan pembinaan, koordinasi, pengawasan, dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi



						kependudukan dan pencatatan sipil pada kabupaten/kota untuk menjamin kualitas pelayanan dan keseragaman standar pelayanan di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.
--	--	--	--	--	--	--

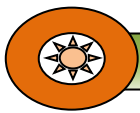
Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja pelayanan, identifikasi permasalahan, serta memperhatikan dinamika pembangunan daerah dan nasional, isu strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 dikelompokkan berdasarkan rumpun urusan sebagai berikut :

A. Urusan Sosial

1. Tingginya tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial yang memerlukan penguatan intervensi perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan kemiskinan secara terpadu dan tepat sasaran.
2. Perlunya penguatan sistem perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat terhadap berbagai risiko sosial.
3. Belum optimalnya layanan rehabilitasi sosial dan dukungan sarana-prasarana pelayanan sosial dalam meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian PPKS.
4. Perlunya peningkatan kapasitas penanganan korban bencana alam dan bencana sosial yang cepat, responsif, dan terintegrasi.
5. Meningkatnya Permasalahan Tuna Sosial dan Penyimpangan Perilaku Sosial
6. Belum optimalnya kualitas, pemutakhiran, dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data sosial-ekonomi sebagai dasar penetapan sasaran program perlindungan sosial, bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanggulangan kemiskinan secara tepat sasaran..

B. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Belum optimalnya kualitas dan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan
Ditandai dengan keterbatasan sarana prasarana pelayanan, ketersediaan blangko KTP-el, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan.



2. Masih rendahnya cakupan aktivasi dan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan.
3. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah, instansi pemerintah, dan lembaga pengguna untuk mendukung pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan kebijakan berbasis data.
4. Belum optimalnya integrasi dan interoperabilitas data kependudukan dengan sistem informasi sektoral guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan pelayanan publik yang terintegrasi.
5. Masih perlunya penguatan pembinaan, koordinasi, pengawasan, dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada kabupaten/kota untuk menjamin kualitas pelayanan dan keseragaman standar pelayanan di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.

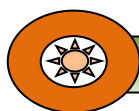
C. Analisis Keterkaitan dengan Prioritas RPJMD

Permasalahan dan isu strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo memiliki keterkaitan langsung dengan agenda pembangunan daerah. Pada urusan sosial, fokus penanganan kemiskinan, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pelayanan bagi PPKS, serta penguatan data sosial mendukung prioritas daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang inklusif.

Sementara itu, pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD), pemanfaatan dan integrasi data kependudukan, serta penguatan pembinaan kabupaten/kota mendukung prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, penguatan sistem data pembangunan daerah, dan perluasan akses layanan publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian, seluruh isu strategis yang dirumuskan tidak hanya menjawab permasalahan pelayanan perangkat daerah, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029.

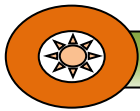
Prioritas RPJMD	Isu Strategis yang Mendukung
-----------------	------------------------------



Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan dan kerentanan social, perlindungan social, rehabilitasi social, validasi data social
Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kualitas layanan adminduk, IKD, pembinaan layanan kabupaten/kota
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemanfaatan data kependudukan, integrasi data kependudukan, validasi data social
Penguatan Data dan Transformasi Digital	IKD, integrasi data kependudukan, pemanfaatan data kependudukan, validasi data social
Pembangunan Inklusif	Pelayanan PPKS, perlindungan social, rehabilitasi social, akses layanan adminduk bagi seluruh penduduk

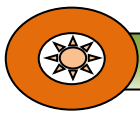
D. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

A. Urusan Sosial	
Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung perluasan program kesejahteraan sosial dan pengembangan sarana-prasarana pelayanan sosial.	Dukungan kebijakan nasional dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, dan pembangunan inklusif.
Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM kesejahteraan sosial, pekerja sosial, pendamping sosial, dan tenaga rehabilitasi sosial.	Adanya jejaring Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), lembaga kesejahteraan sosial, dunia usaha, dan organisasi masyarakat yang dapat mendukung pelayanan sosial.
Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan sosial, termasuk belum memadainya fasilitas rehabilitasi sosial dan rumah singgah	Dukungan regulasi yang semakin kuat terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial serta pembangunan Panti Rehabilitasi Sosial
Validitas, pemutakhiran, dan integrasi DTSEN serta data sosial-ekonomi yang belum optimal	Implementasi DTSEN sebagai basis data tunggal program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor serta pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan kemiskinan dan PPKS.	Komitmen pemerintah daerah dan kabupaten/kota dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
Tingginya dinamika permasalahan sosial akibat kemiskinan, bencana, dan perubahan sosial masyarakat.	Perkembangan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data sosial dan pelayanan sosial berbasis digital.
B. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Keterbatasan fiskal daerah untuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan	Dukungan kebijakan nasional transformasi digital pemerintahan dan administrasi kependudukan.



adminduk.	
Ketersediaan sarana-prasarana pelayanan adminduk dan infrastruktur jaringan yang belum merata.	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terus berkembang dan terintegrasi secara nasional.
Kapasitas SDM pengelola adminduk dan teknologi informasi yang belum merata di kabupaten/kota	Dukungan regulasi nasional terkait administrasi kependudukan, IKD, SPBE, dan Satu Data Indonesia.
Rendahnya literasi digital masyarakat dalam pemanfaatan IKD dan layanan digital adminduk.	Meningkatnya penggunaan teknologi digital oleh masyarakat dan instansi pemerintah.
Belum optimalnya integrasi data kependudukan dengan sistem sektoral dan pemanfaatan data oleh perangkat daerah.	Tingginya kebutuhan data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan kebijakan berbasis data.
Variasi kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan adminduk antar kabupaten/kota	Dukungan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota.





BAB III

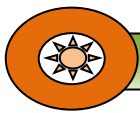
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Pada Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 telah dirumuskan 1 (satu) tujuan yang menggambarkan 2 (dua) urusan yang diampuh yaitu urusan sosial dan urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Tujuan yang diformulasikan sebagai acuan untuk mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi untuk kurun waktu satu sampai berakhirnya masa renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 adalah :

No	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Formula	Sumber Data	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat yang inklusif dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan serta pencatatan sipil	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks komposit yang mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar, pelaksanaan peranan sosial, dan keberdayaan ekonomi yang memungkinkan masyarakat hidup layak, berfungsi sosial, dan mandiri secara ekonomi.	$IKesos \text{ Provinsi} = \frac{IKesos \text{ Kab/Kota}}{n}$ n = jumlah kab/kota	Kementerian Sosial RI, DTSEN, Survei IKS, dan Dinas Sosial	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo mengampu urusan sosial serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang saling terkait dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial berkontribusi pada perlindungan kelompok rentan dan penanggulangan kemiskinan, sedangkan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjamin pemenuhan hak identitas penduduk serta penyediaan data yang akurat untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan. Secara bersama-sama, kedua urusan tersebut mendukung terwujudnya pelayanan dasar yang berkualitas, perlindungan sosial yang tepat sasaran, penguatan data pembangunan, dan pelayanan publik yang inklusif di Provinsi Gorontalo.



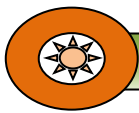
3.2 Sasaran Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029.

Sasaran Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran spesifik dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo selang tahun 2025 – 2029 adalah :

1. *Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat dengan Indikator Sasaran “Persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan sosial”.*
2. *Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemanfaatan Data Kependudukan berbasis Digital “Jumlah Daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori “Sangat Baik”.*

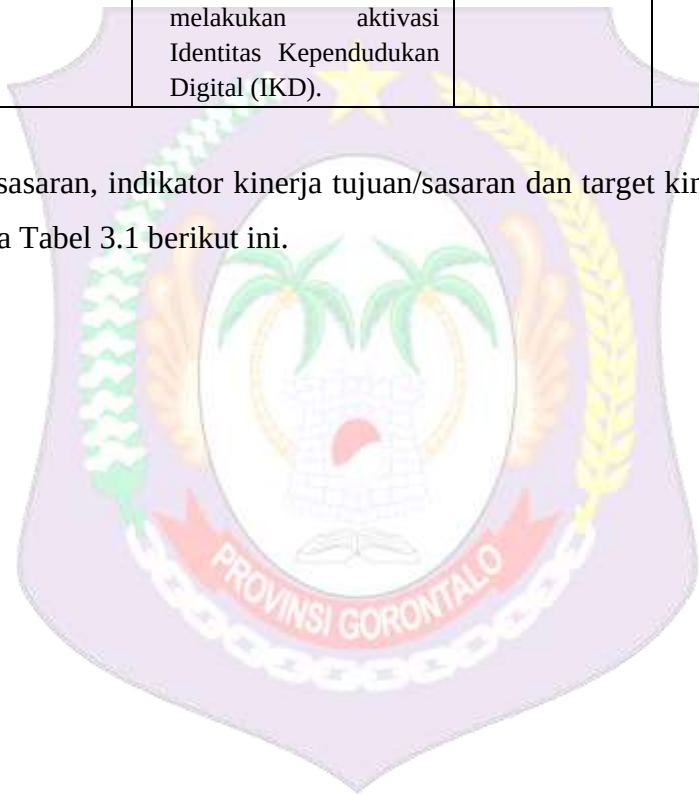
Dalam menentukan indikator sasaran dan target dalam 5 tahun ke depan dijelaskan formulasi perhitungan indikator yakni :

Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Numerator / Denominator	Rumus	Basis Data	Sumber Data
Persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan sosial.	Masyarakat rentan adalah penduduk yang karena kondisi sosial, ekonomi, fisik, psikologis, geografis, atau demografis memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya, pelayanan dasar, perlindungan sosial, dan kesempatan ekonomi sehingga berpotensi mengalami penurunan kesejahteraan dan memerlukan intervensi khusus dari pemerintah.	- Jumlah masyarakat rentan yang menerima layanan perlindungan sosial pada tahun berjalan. - Jumlah masyarakat rentan yang terdata dan menjadi sasaran program perlindungan sosial pada tahun berjalan.	$\left(\frac{\text{Jumlah masyarakat rentan yang menerima perlindungan sosial}}{\text{Jumlah masyarakat rentan sasaran program}} \times 100\% \right)$	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), data PPKS, dan/atau basis data sosial yang ditetapkan pemerintah.	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo
Jumlah Daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori “Sangat Baik”	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah (IKL Dukcapil Daerah) adalah nilai yang menggambarkan tingkat kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada masing-masing pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam satu periode penilaian tertentu. IKL Dukcapil Daerah digunakan untuk	- Jumlah penduduk usia 0–4 tahun yang memiliki akta kelahiran. - Jumlah penduduk meninggal yang telah memiliki akta kematian. - Jumlah penduduk berstatus kawin yang memiliki akta perkawinan atau buku nikah. - Jumlah penduduk berstatus cerai hidup yang memiliki akta	$\text{IKL Dukcapil Daerah} = \text{Nilai Dimensi Layanan} + \text{Nilai Dimensi Pemanfaatan Data Kependudukan} + \text{Nilai Dimensi Implementasi IKD}$	Data Administrasi Kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD), Data Pemanfaatan Data Kependudukan, Data Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD),	SIAD, Data PKS Pemanfaatan Data, dan Data Aktivasi IKD Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri



	menentukan predikat kualitas layanan Dukcapil pada setiap daerah berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. Penilaian ini menjadi dasar untuk melihat tingkat kinerja layanan Dukcapil di daerah serta mendorong peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.	perceraian. - Jumlah penduduk wajib KIA (usia 0–17 tahun kurang satu hari dan belum kawin) yang memiliki KIA. - Jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman KTP-el. - Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data yang telah ditandatangani dan berlaku. - Jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).		serta hasil verifikasi dan validasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.	
--	--	---	--	---	--

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran dan target kinerja perangkat daerah disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.



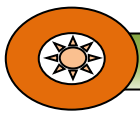


TABEL 3.1

**TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
- Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan perlindungan social bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif - Terwujudnya regulasi dan tata Kelola pelayanan public yang berintegritas dan adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial	52,23	53,79	55,40	57,06	58,77	60,53	
		Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	Persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan sosial	20	21,24	21,94	23,18	24,42	26,19	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemanfaatan Data Kependudukan berbasis Digital.	Jumlah Daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori “Sangat Baik”	1	1	1	1	1	1	





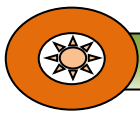
3.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo. Gambaran penahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang :

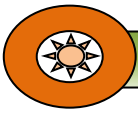
Tabel 3.3

**Pentahapan Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Gorontalo**

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Urusan Sosial				
Validasi pemutakhiran data	Penguatan ketepatan sasaran	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan bantuan sosial	Integrasi bansos dengan program pemberdayaan sosial dan pengentasan kemiskinan	Penguatan bansos adaptif, digitalisasi layanan, dan kemandirian penerima manfaat
Pemutakhiran dan validasi data kesejahteraan sosial serta DTSEN	Penguatan tata kelola dan kualitas data sosial-ekonomi	Perluasan pemanfaatan data dalam perencanaan dan penetapan sasaran program	Integrasi data kesejahteraan sosial dengan sistem data sektoral dan daerah	Optimalisasi pemanfaatan data terpadu untuk kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy)
Peningkatan mutu layanan SPM Bidang Sosial	Perencanaan dan Pembangunan Panti Terpadu Rehabilitasi	Pembangunan Panti Terpadu Rehabilitasi sosial Tahap I	Pembangunan Panti Terpadu Rehabilitasi sosial Tahap II	Pembangunan Panti Terpadu Rehabilitasi sosial Tahap III
Identifikasi kesenjangan layanan dan pemetaan capaian SPM Bidang Sosial	Penguatan sarana-prasarana dan standar pelayanan sosial	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan sosial bagi masyarakat	Integrasi layanan sosial lintas program dan lintas sektor	Konsolidasi pemenuhan SPM Bidang Sosial secara berkelanjutan dan merata
Pemetaan	Peningkatan	Penguatan	Pengembangan	Konsolidasi



kebutuhan kompetensi SDM dan kapasitas kelembagaan	kompetensi SDM kesejahteraan sosial melalui pendidikan dan pelatihan	peran lembaga sosial, pilar-pilar sosial, dan kemitraan	sistem kerja kolaboratif dan profesional berbasis kinerja	kelembagaan dan SDM yang adaptif, profesional, dan berdaya saing
Pendataan dan identifikasi kebutuhan kelompok rentan	Peningkatan akses kelompok rentan terhadap layanan sosial dasar	Perluasan program perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan	Integrasi layanan perlindungan dan pemberdayaan berbasis keluarga dan komunitas	Penguatan kemandirian, partisipasi sosial, dan inklusivitas kelompok rentan
B. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
Pemetaan kondisi penyelenggaraan adminduk dan penguatan koordinasi dengan kabupaten/kota	Peningkatan pembinaan teknis, pendampingan, dan penguatan kapasitas aparatur Disdukcapil kabupaten/kota	Penguatan monitoring, evaluasi, dan pengawasan kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Harmonisasi standar pelayanan dan penguatan sinergi penyelenggaraan adminduk antar kabupaten/kota	Konsolidasi tata kelola penyelenggaraan adminduk yang berkualitas, akuntabel, dan berstandar
Peningkatan kualitas, validasi, dan pemutakhiran data kependudukan	Penguatan kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD dan instansi pengguna	Perluasan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik dan penyusunan kebijakan daerah	Integrasi data kependudukan dengan data sektoral dan sistem informasi daerah	Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan sebagai basis pelayanan publik dan pembangunan berbasis data
Penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur pendukung, dan pemanfaatan layanan digital adminduk	Peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan sistem layanan administrasi kependudukan berbasis digital	Perluasan implementasi layanan digital dan percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Penguatan interoperabilitas sistem informasi dan integrasi layanan digital lintas sektor	Konsolidasi tata kelola administrasi kependudukan digital yang terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan



3.4. Strategi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo

dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

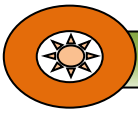
Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah disebutkan diatas, maka disusunlah strategi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

A. Urusan Sosial :

1. Penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu berbasis data.
2. Pengembangan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang inklusif dan adaptif terhadap risiko sosial.
3. Peningkatan kualitas rehabilitasi sosial dan sarana-prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
4. Penguatan kapasitas penanganan bencana sosial dan bencana alam yang responsif dan terintegrasi.
5. Penguatan pencegahan dan penanganan permasalahan tuna sosial serta penyimpangan perilaku sosial.
6. Penguatan tata kelola dan pemanfaatan DTSEN untuk mendukung ketepatan sasaran program kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

B. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Peningkatan kualitas dan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Percepatan implementasi dan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
3. Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan berbasis data.
4. Penguatan integrasi dan interoperabilitas data kependudukan dalam kerangka Satu Data Indonesia.
5. Penguatan pembinaan, koordinasi, pengawasan, dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.



3.5. Arah Kebijakan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Selain itu arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut :

A. Urusan Sosial :

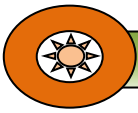
1. Penguatan perlindungan sosial yang adaptif, terpadu, dan tepat sasaran.
2. Penguatan data kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan berbasis data terpadu.
3. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.
4. Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial.
5. Penguatan perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan secara inklusif.

B. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Penguatan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
2. Penguatan integrasi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan daerah.
3. Pengembangan tata kelola administrasi kependudukan berbasis digital dan terintegrasi.

3.5.1 Arah Kebijakan Dalam Mendukung Program Sekolah Rakyat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengarahkan kebijakan pada



penguatan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dengan pembangunan sumber daya manusia. Program Sekolah Rakyat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui penyediaan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Arah kebijakan yang dilaksanakan difokuskan yakni :

1) Penguatan validasi dan pemutakhiran data sasaran berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Untuk memastikan peserta Program Sekolah Rakyat berasal dari keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria prioritas. Pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi menjadi landasan dalam penetapan sasaran program sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung secara tepat sasaran, adil, dan akuntabel.

2) Sinergi dan integrasi program perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan.

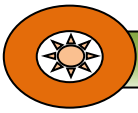
Guna mendukung keberhasilan Program Sekolah Rakyat. Pendekatan ini dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, lembaga kesejahteraan sosial, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar peserta didik dan keluarganya.

3) Penguatan perlindungan sosial bagi keluarga peserta Program Sekolah Rakyat.

Melalui berbagai intervensi sosial yang bertujuan meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi keluarga. Dengan demikian, anak-anak dari keluarga miskin dapat mengikuti proses pendidikan secara berkelanjutan tanpa terkendala oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

4) Penguatan pendampingan sosial dan pemberdayaan keluarga penerima manfaat

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kemandirian ekonomi keluarga. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akses pendidikan anak, tetapi juga memperkuat kapasitas keluarga dalam keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan.

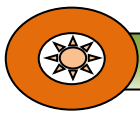


5) Pemanfaatan data kependudukan dan sistem informasi terintegrasi.

Untuk mendukung verifikasi peserta, pemantauan keberlanjutan pendidikan, serta evaluasi pelaksanaan program. Langkah ini sejalan dengan upaya mewujudkan pelayanan publik yang adaptif, berbasis data, dan terintegrasi.

Melalui arah kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen mendukung keberhasilan Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Gorontalo.





BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ke dalam bentuk intervensi yang lebih operasional, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan secara sistematis, terukur dan berbasis hasil (outcome). Proses perumusan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisis kebutuhan, prioritas pembangunan nasional dan daerah, ketersediaan sumber daya, serta keterlibatan pemangku kepentingan.

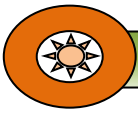
Perumusan ini diarahkan untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Dinas, serta mendukung pencapaian kinerja pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

4.1. Program Renstra Tahun 2025-2029

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta menjawab tantangan dan isu strategis yang berkembang secara global, nasional dan regional, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo merumuskan 11 (sebelas) program, dimana 10 (sepuluh) program diantaranya adalah program prioritas.

Program-program tersebut dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) urusan utama, sebagai berikut :

- a. Urusan Penunjang sebanyak 1 (satu) program
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Urusan Bidang Sosial sebanyak 6 (lima) program
 1. Program Pemberdayaan Sosial
 2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
 3. Program Rehabilitasi Sosial
 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 5. Program Penanganan Bencana
 6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

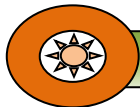


c. Urusan Bidang Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 4 (empat) program

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan program-program yang dijabarkan dalam target yang terukur dan disertai dengan estimasi alokasi anggaran yang realistis sebagaimana tergambar pada tabel 4.1 di bawah ini :

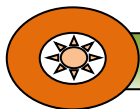




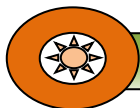
Tabel 4.1

Program Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

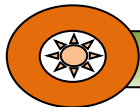
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					21.037.500.000		24.581.302.722		25.698.024.728		24.811.938.439		23.568.659.566	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					11.496.805.218		11.988.420.393		12.108.004.596		12.228.784.749		12.350.772.475	
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	11.496.805.218	100	11.988.420.393	100	12.108.004.596	100	12.228.784.749	100	12.350.772.475	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					841.643.088		1.349.966.000		1.363.465.660		1.377.100.316		1.390.871.319	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	100	100	100	841.643.088	100	1.349.966.000	100	1.363.465.660	100	1.377.100.316	100	1.390.871.319	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					133.357.544		147.195.929		148.667.888		150.154.566		151.656.111	
Meningkatnya layanan penanganan Warga Negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	100	133.357.544	100	147.195.929	100	148.667.888	100	150.154.566	100	151.656.111	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					3.697.042.576		5.007.198.000		5.928.478.960		4.844.997.110		3.402.348.952	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100	3.697.042.576	100	5.007.198.000	100	5.928.478.960	100	4.844.997.110	100	3.402.348.952	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase sarana prasarana yang disediakan bagi peyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan/atau gelandangan dan pengemis didalam panti yang layak dan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase sarana prasarana bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang disediakan secara layak dan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					3.086.872.994		4.087.369.000		4.128.242.690		4.169.525.116		4.211.220.365	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	12,99	16,19	16,99	3.086.872.994	17,4	4.087.369.000	18,21	4.128.242.690	19,02	4.169.525.116	20,23	4.211.220.365	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	0,3	7,97	8,77		9,57		10,36		11,16		11,96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		

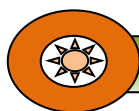


BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.369.277.176		1.388.285.400		1.402.168.254		1.416.189.936		1.430.351.833	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi (%)	100	100	100	1.369.277.176	100	1.388.285.400	100	1.402.168.254	100	1.416.189.936	100	1.430.351.833	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase masyarakat didaerah rawan bencana yang meningkat kasiapsiagaannya (%)	16	18	20		22		24		26		28		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					412.501.404		612.868.000		618.996.680		625.186.646		631.438.511	
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	412.501.404	100	612.868.000	100	618.996.680	100	625.186.646	100	631.438.511	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
TOTAL KESELURUHAN					21.037.500.000		24.581.302.722		25.698.024.728.		24.811.938.439.		23.568.659.566	
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					84.044.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	10	10	11	84.044.000	12	100.000.000	13	100.000.000	14	100.000.000	15	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	55	55	56		57		59		59		60		



RENSTRA 2025 - 2029

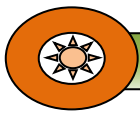
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					76.264.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	76.264.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99	99,1	99,2		99,3		99,4		99,5		99,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					103.206.000		103.206.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan (%)	100	100	100	103.206.000	100	103.206.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					86.327.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100	100	100	86.327.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
TOTAL KESELURUHAN					21.387.341.000		25.034.508.722		26.248.024.728.		25.361.938.439.		24.138.659.566	



4.2. Kegiatan Renstra Tahun 2025-2029

Perumusan kegiatan merupakan tahapan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan menterjemahkan program ke dalam bentuk intervensi langsung dan terukur. Dalam konteks pelaksanaan urusan sosial, 16 kegiatan berikut disusun untuk mempercepat pencapaian sasaran, meningkatkan pelayanan publik, percepatan penuntasan kemiskinan serta meningkatnya cakupan perlindungan social bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif di Provinsi Gorontalo.

PROGRAM/KEGIATAN	
Urusan Sosial	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
1.06.06	Program Penanganan Bencana
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

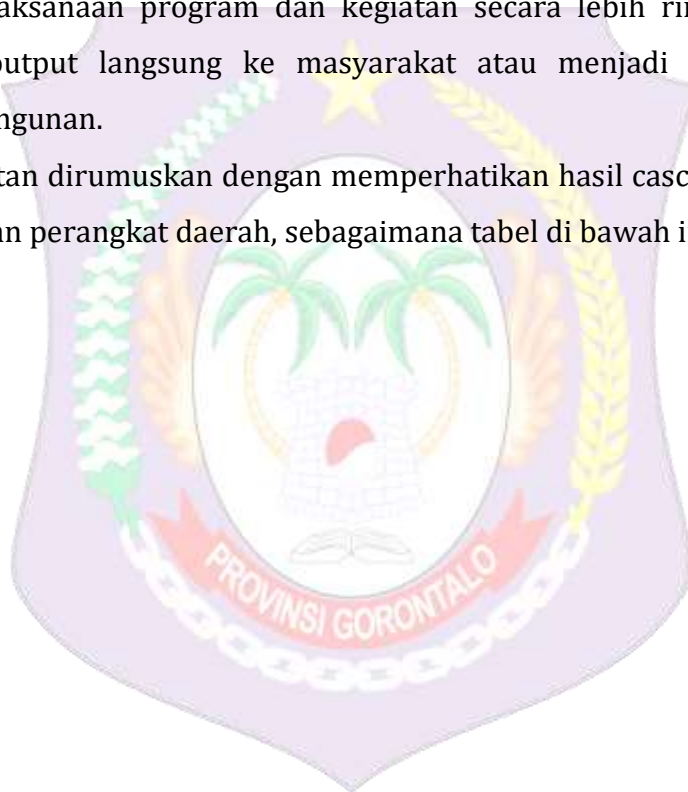


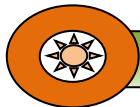
2.12.03	Program Pencatatan Sipil
2.12.03.1.02	Penyeenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan

4.3. Subkegiatan Renstra Tahun 2025-2029

Perumusan subkegiatan merupakan tahapan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah yang sifat operasional dan terukur. Subkegiatan disusun untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih rinci dengan tujuan menghasilkan output langsung ke masyarakat atau menjadi dasar pencapaian outcome pembangunan.

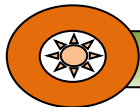
Subkegiatan dirumuskan dengan memperhatikan hasil cascading dari sasaran daerah ke sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel di bawah ini :



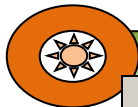


TABEL 4.2
RUMUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

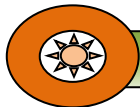
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.06.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
- Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatkannya cakupan perlindungan social bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan		Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)		
					Persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan sosial (%)		
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya pengumpulan data statistik sektoral daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.06.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.06.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	



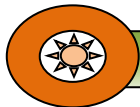
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.06.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.06.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.06.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.06.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.06.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.06.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.06.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.06.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.06.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



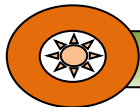
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.06.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	



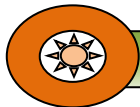
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial		Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	



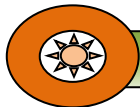
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.1.01 - Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Keluarga)	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
					Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Keluarga)	1.06.02.1.02.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Lembaga)	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Lembaga)	1.06.02.1.02.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	
				Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi keluarga miskin dan rentan di Provinsi	Jumlah Keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi di Provinsi	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
					Jumlah Keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi di Provinsi	1.06.02.3.02.0005 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi di Provinsi	
				Meningkatnya layanan penanganan Warga Negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani ()	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
				Terfasilitasinya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke kab/kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.03.1.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.03.1.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	



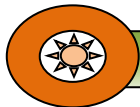
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase sarana prasarana yang disediakan bagi peyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan/atau gelandangan dan pengemis didalam panti yang layak dan sesuai standar (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase sarana prasarana bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang disediakan secara layak dan sesuai standar (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0002 - Penyediaan Sandang	



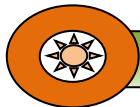
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0003 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0004 - Penyediaan Alat Bantu	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
				Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0017 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	



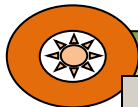
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0009 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0011 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (Dokumen)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (Dokumen)	1.06.04.1.01.0021 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya. (Kabupaten/Kota)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya. (Kabupaten/Kota)	1.06.04.1.01.0015 - Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlarant Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlarant Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarant di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlarant Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0016 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlarant	
				Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi (orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarant di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi (orang)	1.06.04.1.01.0019 - Pemulasaraan	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarant di dalam Panti	
					Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (orang)	1.06.04.1.01.0020 - Fasilitas Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	
				Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarant di dalam Panti	
					Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0001 - Pengasuhan	
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarant di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0015 - Penyediaan Permakanan	
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarant di dalam Panti	

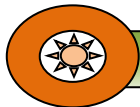


NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0003 - Penyediaan Sandang	
				Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0004 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
				Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0022 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	

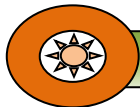


RENSTRA 2025 - 2029

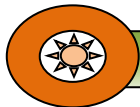
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0009 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0011 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
				Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0023 - Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (Dokumen)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (Dokumen)	1.06.04.1.02.0017 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
				Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (Orang)	1.06.04.1.02.0018 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Pemulasaraan bagi Anak Terlantar Kewenangan provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0019 - Pemulasaraan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0020 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0021 - Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0001 - Penyediaan Permakanan	
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0002 - Penyediaan Sandang	
				Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0003 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	



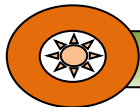
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0004 - Penyediaan Alat Bantu	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0016 - Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	
				Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0015 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	



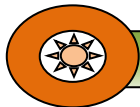
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0011 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
				Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0012 - Pemulasaraan	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1.06.04.1.03.0017 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0018 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0001 - Penyediaan Permakanan	



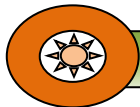
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0002 - Penyediaan Sandang	
				Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0003 - Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0004 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0006 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0007 - Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	
				Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0013 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	



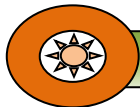
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0009 - Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
				Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0010 - Pemulangan ke Daerah Asal	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti (Dokumen)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti (Dokumen)	1.06.04.1.04.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0014 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0015 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan (Orang)	1.06.04.1.04.0016 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	



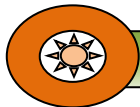
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya pemulasaraan bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0017 - Pemulasaraan	
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0001 - Penyediaan Permakanan	
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0002 - Penyediaan Sandang	
				Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0003 - Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0004 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	



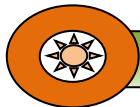
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0006 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0007 - Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	
				Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0013 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0009 - Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	



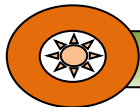
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal (Orang)	1.06.04.1.05.0010 - Pemulangan ke Daerah Asal	
				Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA (Dokumen)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA (Dokumen)	1.06.04.1.05.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	
				Terpenuhinya orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0014 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0015 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	



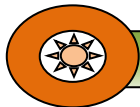
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya (Orang)	1.06.04.1.05.0016 - Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
				Terlaksananya Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah (Orang)	1.06.04.1.05.0017 - Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	
				Terlaksananya pemulasaraan bagi penyandang disabilitas kewenangan provinsi	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0018 - Pemulasaraan	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	



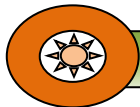
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.01 - Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
					Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.01.0001 - Pengangkatan Anak antar WNI	
				Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.01 - Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
					Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.01.0002 - Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
				Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota (Orang)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota (Orang)	1.06.05.1.02.0011 - Fasilitas Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02.0003 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
				Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin (Kab/Kota)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin (Kab/Kota)	1.06.05.1.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	



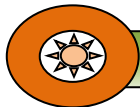
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase masyarakat didaerah rawan bencana yang meningkat kasiapsiagaannya (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
				Pengungsi dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01.0011 - Penyediaan Sandang	
				Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01.0013 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	



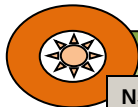
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	
				Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.06.1.01.0015 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	
				Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)	1.06.06.1.01.0016 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	
				Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana (Orang)	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana (Orang)	1.06.06.1.01.0018 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	
				Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan nasional yang dikelola dengan baik (%)	1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Dokumen)	1.06.07.1.01 - Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Dokumen)	1.06.07.1.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
Terwujudnya Regulasi dan tata Kelola Pelayanan Publik yang berintegritas dan Adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Tata kelola Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Makam)	1.06.07.1.01 - Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Makam)	1.06.07.1.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
				Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Laporan)	1.06.07.1.01 - Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Laporan)	1.06.07.1.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
					Tingkat Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (%)		
					Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.1.02 - Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.1.02 - Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.1.02.0001 - Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.1.02.0004 - Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	



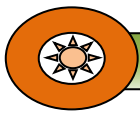
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		2.12.02.1.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
						2.12.02.1.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.1.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.1.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.1.02.0001 - Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.1.02.0002 - Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	
				Persentase Terlaksananya konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.1.03 - Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.1.03.0002 - Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan		Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Orang)	2.12.04.1.03 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	



RENSTRA 2025 - 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan		Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Orang)	2.12.04.1.03.0002 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
					Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
				Jumlah dokumen penyediaan data kependudukan provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia (Dokumen)	2.12.05.1.01 - Penyediaan Profil Kependudukan	
					Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia (Dokumen)	2.12.05.1.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	





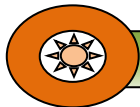
Untuk mencapai target kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, pada Renstra Tahun 2025-2029 telah disusun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2025 sampai dengan 2030. Tahun 2030 memiliki posisi strategis, bukan hanya sebagai lanjutan program sebelumnya akan tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan. Target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2030 dirancang sebagai pijakan awal dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun tersebut serta menjadi fondasi transisi menuju kebijakan dan rencana pembangunan jangka menengah daerah berikutnya.

Berikut rencana program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini :

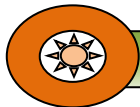


Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

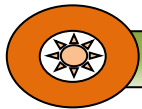
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				21.037.500.000		22.846.400.722		23.074.864.728		23.305.613.439		23.538.659.566		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				11.496.805.218		11.958.420.393		12.078.004.596		12.198.784.749		12.320.772.475		
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	11.496.805.218	100	11.958.420.393	100	12.078.004.596	100	12.198.784.749	100	12.320.772.475	1.06.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Sosial	
1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				681.964.632		771.640.000		779.356.400		787.149.964		795.021.462		
1.06.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				110.198.000		187.860.000		189.738.600		191.635.986		193.552.345		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	4	110.198.000	4	187.860.000	4	189.738.600	4	191.635.986	4	193.552.345		
1.06.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
1.06.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				571.766.632		583.780.000		589.617.800		595.513.978		601.469.117		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	571.766.632	1	583.780.000	1	589.617.800	1	595.513.978	1	601.469.117		
1.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.169.143.542		8.970.133.393		9.059.834.726		9.150.433.072		9.241.937.402		
1.06.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				123.321.544		106.757.000		107.824.570		108.902.815		109.991.843		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	123.321.544	1	106.757.000	1	107.824.570	1	108.902.815	1	109.991.843		



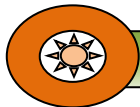
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.021.821.998		8.839.136.393		8.927.527.756		9.016.803.033		9.106.971.063		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	70	70	9.021.821.998	73	8.839.136.393	76	8.927.527.756	78	9.016.803.033	80	9.106.971.063		
1.06.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				24.000.000		24.240.000		24.482.400		24.727.224		24.974.496		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	24.000.000	1	24.240.000	1	24.482.400	1	24.727.224	1	24.974.496		
1.06.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				120.049.000		159.681.000		161.277.810		162.890.588		164.519.493		
1.06.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				68.812.000		111.201.000		112.313.010		113.436.140		114.570.501		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15	10	68.812.000	10	111.201.000	10	112.313.010	10	113.436.140	10	114.570.501		
1.06.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				19.887.000		20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	160	70	19.887.000	73	20.200.000	76	20.402.000	78	20.606.020	80	20.812.080		
1.06.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				31.350.000		28.280.000		28.562.800		28.848.428		29.136.912		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	70	31.350.000	73	28.280.000	76	28.562.800	78	28.848.428	80	29.136.912		
1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				118.243.600		181.396.000		183.209.960		185.042.059		186.892.477		
1.06.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				31.000.000		38.885.000		39.273.850		39.666.588		40.063.253		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	31.000.000	1	38.885.000	1	39.273.850	1	39.666.588	1	40.063.253		



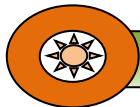
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		15.150.000		15.301.500		15.454.515		15.609.060		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	1	15.150.000	1	15.301.500	1	15.454.515	1	15.609.060		
1.06.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.360.000		17.271.000		17.443.710		17.618.147		17.794.328		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	16.360.000	1	17.271.000	1	17.443.710	1	17.618.147	1	17.794.328		
1.06.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.433.000		20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	3	21.433.000	3	20.200.000	3	20.402.000	3	20.606.020	3	20.812.080		
1.06.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				5.250.000		5.050.000		5.100.500		5.151.505		5.203.020		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	5.250.000	1	5.050.000	1	5.100.500	1	5.151.505	1	5.203.020		
1.06.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.164.250		15.150.000		15.301.500		15.454.515		15.609.060		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	1	17.164.250	1	15.150.000	1	15.301.500	1	15.454.515	1	15.609.060		
1.06.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				10.445.000		14.140.000		14.281.400		14.424.214		14.568.456		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10.445.000	1	14.140.000	1	14.281.400	1	14.424.214	1	14.568.456		
1.06.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.591.350		25.250.000		25.502.500		25.757.525		26.015.100		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	1	16.591.350	1	25.250.000	1	25.502.500	1	25.757.525	1	26.015.100		
1.06.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		30.300.000		30.603.000		30.909.030		31.218.120		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	0	0	1	30.300.000	1	30.603.000	1	30.909.030	1	31.218.120		



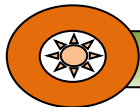
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		626.200.000		632.462.000		638.786.730		645.174.485		
1.06.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		50.500.000		51.005.000		51.515.050		52.030.200		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	50.500.000	1	51.005.000	1	51.515.050	1	52.030.200		
1.06.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		555.500.000		561.055.000		566.665.660		572.332.205		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	555.500.000	1	561.055.000	1	566.665.660	1	572.332.205		
1.06.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	20.200.000	1	20.402.000	1	20.606.020	1	20.812.080		
1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				749.846.444		727.907.000		735.186.070		742.537.930		749.963.308		
1.06.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				235.584.128		242.400.000		244.824.000		247.272.240		249.744.962		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	1	235.584.128	1	242.400.000	1	244.824.000	1	247.272.240	1	249.744.962		
1.06.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				514.262.316		485.507.000		490.362.070		495.265.690		500.218.346		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	2	514.262.316	2	485.507.000	2	490.362.070	2	495.265.690	2	500.218.346		
1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				657.558.000		521.463.000		526.677.630		531.944.406		537.263.848		
1.06.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.970.000		51.813.000		52.331.130		52.854.441		53.382.985		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	55	55	55.970.000	55	51.813.000	55	52.331.130	55	52.854.441	55	53.382.985		



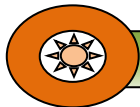
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				201.488.000		40.400.000		40.804.000		41.212.040		41.624.160		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	4	201.488.000	4	40.400.000	4	40.804.000	4	41.212.040	4	41.624.160		
1.06.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	4	20.200.000	4	20.402.000	4	20.606.020	4	20.812.080		
1.06.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.650.000		85.850.000		86.708.500		87.575.585		88.451.340		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	40.650.000	1	85.850.000	1	86.708.500	1	87.575.585	1	88.451.340		
1.06.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				359.450.000		323.200.000		326.432.000		329.696.320		332.993.283		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	12	359.450.000	12	323.200.000	12	326.432.000	12	329.696.320	12	332.993.283		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				841.643.088		1.349.966.000		1.363.465.660		1.377.100.316		1.390.871.319		
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	100	100	841.643.088	100	1.349.966.000	100	1.363.465.660	100	1.377.100.316	100	1.390.871.319	1.06.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Sosial	



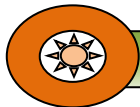
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	100	100		100		100		100					
	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase)	100	100		100		100		100					
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100		100		100		100					
1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				88.660.772		137.966.000		139.345.660		140.739.116		142.146.507		
1.06.02.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				88.660.772		137.966.000		139.345.660		140.739.116		142.146.507		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	6	6	88.660.772	6	137.966.000	6	139.345.660	6	140.739.116	6	142.146.507		
1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi				752.982.316		1.212.000.000		1.224.120.000		1.236.361.200		1.248.724.812		
1.06.02.1.02.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi				752.982.316										
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Keluarga)	77	77	752.982.316	77	808.000.000	77	816.080.000	77	824.240.800	77	832.483.208		



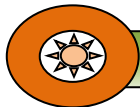
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.02.1.02.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi				0		404.000.000		408.040.000		412.120.400		416.241.604		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Lembaga)	92	20	0	20	404.000.000	20	408.040.000	20	412.120.400	20	416.241.604		
1.06.02.3.02.0005 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi														
Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan di Provinsi	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi di Provinsi	0		0		0		0		0		0		
1.06.02.1.02.0008 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi														
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	0		0		0		0		0		0		
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				133.357.544		147.195.929		148.667.888		150.154.566		151.656.111		
Meningkatnya layanan penanganan Warga Negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	133.357.544	100	147.195.929	100	148.667.888	100	150.154.566	100	151.656.111	1.06.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Sosial	



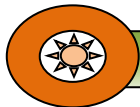
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.03.1.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal				133.357.544		147.195.929		148.667.888		150.154.566		151.656.111		
1.06.03.1.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal				133.357.544		147.195.929		148.667.888		150.154.566		151.656.111		
Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	6	6	133.357.544	6	147.195.929	6	148.667.888	6	150.154.566	6	151.656.111		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				3.697.042.576		3.302.296.000		3.335.318.960		3.368.672.110		3.402.348.952		
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	3.697.042.576	100	3.302.296.000	100	3.335.318.960	100	3.368.672.110	100	3.402.348.952	1.06.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Sosial	
	Persentase sarana prasarana yang disediakan bagi peyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan/atau gelandangan dan pengemis didalam panti yang layak dan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100					
	Persentase sarana prasarana bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang disediakan secara layak dan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100					
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100		100		100		100					



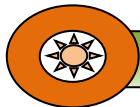
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100		100		100		100					
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100		100		100		100					
1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerLantar di dalam Panti				499.610.316		497.930.000		502.909.300		507.938.384		513.017.774		
1.06.04.1.01.0003 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				20.724.000		49.490.000		49.984.900		50.484.749		50.989.596		
Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	4	12	20.724.000	14	49.490.000	16	49.984.900	18	50.484.749	20	50.989.596		
1.06.04.1.01.0021 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter				59.338.000		50.500.000		51.005.000		51.515.050		52.030.200		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter (Dokumen)	2	1	59.338.000	1	50.500.000	1	51.005.000	1	51.515.050	1	52.030.200		
1.06.04.1.01.0015 - Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas				0		20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya. (Kabupaten/Kota)	6	6	0	6	20.200.000	6	20.402.000	6	20.606.020	6	20.812.080		



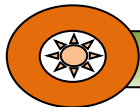
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.1.01.0020 - Fasilitas Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan				0		10.100.000		10.201.000		10.303.101		10.406.040		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (orang)	4	12	0	14	10.100.000	16	10.201.000	18	10.303.101	20	10.406.040		
1.06.04.1.01.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				200.330.316		101.000.000		102.010.000		103.030.000		104.060.401		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	4	12	200.330.316	14	101.000.000	16	102.010.000	18	103.030.000	20	104.060.401		
1.06.04.1.01.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				0		10.100.000		10.201.000		10.303.010		10.406.040		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	4	12	0	14	10.100.000	16	10.201.000	18	10.303.010	20	10.406.040		
1.06.04.1.01.0019 – Pemulasaraan				0		5.050.000		5.100.500		5.151.505		5.203.020		
Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi (orang)	1	1	0	1	5.050.000	1	5.100.500	1	5.151.505	1	5.203.020		
1.06.04.1.01.0016 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar				0		20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)	4	12	0	14	20.200.000	16	20.402.000	18	20.606.020	20	20.812.080		
1.06.04.1.01.0001 - Penyediaan Permakanan				196.218.000		151.500.000		153.015.000		154.545.150		156.090.601		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	4	12	196.218.000	14	151.500.000	16	153.015.000	18	154.545.150	20	156.090.601		



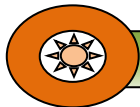
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.1.01.0017 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				0		5.050.000		5.100.500		5.151.505		5.203.020		
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi (Orang)	3	3	0	3	5.050.000	3	5.100.500	3	5.151.505	3	5.203.020		
1.06.04.1.01.0009 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				4.000.000		4.040.000		4.080.400		4.121.204		4.162.416		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	4	12	4.000.000	14	4.040.000	16	4.080.400	18	4.121.204	20	4.162.416		
1.06.04.1.01.0004 - Penyediaan Alat Bantu				0		10.100.000		10.201.000		10.303.010		10.406.040		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	4	0	0	4	10.100.000	4	10.201.000	4	10.303.010	4	10.406.040		
1.06.04.1.01.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				4.000.000		5.050.000		5.100.500		5.151.505		5.203.020		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	4	12	4.000.000	14	5.050.000	16	5.100.500	18	5.151.505	20	5.203.020		
1.06.04.1.01.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				0		15.150.000		15.301.500		15.454.515		15.609.060		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1	1	0	1	15.150.000	1	15.301.500	1	15.454.515	1	15.609.060		
1.06.04.1.01.0011 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				0		20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1	1	0	1	20.200.000	1	20.402.000	1	20.606.020	1	20.812.080		



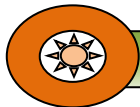
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.1.01.0002 - Penyediaan Sandang				15.000.000		20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	4	12	15.000.000	14	20.200.000	16	20.402.000	18	20.606.020	20	20.812.080		
1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				1.181.776.316		1.010.000.000		1.020.100.000		1.030.301.000		1.040.604.106		
1.06.04.1.02.0004 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				0		10.100.000		10.201.000		10.303.010		10.406.040		
Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	30	50	0	55	10.100.000	60	10.201.000	65	10.303.010	70	10.406.040		
1.06.04.1.02.0017 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				193.923.316		151.500.000		153.015.000		154.545.150		156.090.601		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (Dokumen)	2	1	193.923.316	1	151.500.000	1	153.015.000	1	154.545.150	1	156.090.601		
1.06.04.1.02.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				12.200.000		30.300.000		30.603.000		30.909.030		31.218.120		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	30	50	12.200.000	55	30.300.000	60	30.603.000	65	30.909.030	70	31.218.120		
1.06.04.1.02.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				32.203.000		40.400.000		40.804.000		41.212.040		41.624.260		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	30	50	32.203.000	55	40.400.000	60	40.804.000	65	41.212.040	70	41.624.260		
1.06.04.1.02.0018 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi				0		25.250.000		25.502.500		25.757.525		26.015.100		
Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (Orang)	30	50	0	55	25.250.000	60	25.502.500	65	25.757.525	70	26.015.100		



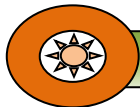
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.1.02.0019 - Pemulasaraan				0		10.100.000		10.201.000		10.303.010		10.406.040		
Terlaksananya Pemulasaraan bagi Anak Terlantar Kewenangan provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi (Orang)	2	2	0	2	10.100.000	2	10.201.000	2	10.303.010	2	10.406.040		
1.06.04.1.02.0001 - Pengasuhan				0		60.600.000		61.206.000		61.818.060		62.436.240		
Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	4	4	0	4	60.600.000	4	61.206.000	4	61.818.060	4	62.436.240		
1.06.04.1.02.0021 - Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)				0		25.250.000		25.502.500		25.757.525		26.015.100		
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi (Orang)	0	5	0	5	25.250.000	5	25.502.500	5	25.757.525	5	26.015.100		
1.06.04.1.02.0020 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar				0		20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)	30	50	0	55	20.200.000	60	20.402.000	65	20.606.020	70	20.812.080		
1.06.04.1.02.0015 - Penyediaan Permakanan				864.450.000		505.000.000		510.050.000		515.150.500		520.302.005		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	45	50	864.450.000	55	505.000.000	60	510.050.000	65	515.150.500	70	520.302.005		
1.06.04.1.02.0022 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar				0		5.050.000		5.100.500		5.151.505		5.203.020		
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)	1	1	0	2	5.050.000	2	5.100.500	2	5.151.505	2	5.203.020		



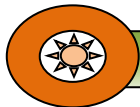
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.1.02.0009 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				0		20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	30	50	0	55	20.200.000	60	20.402.000	65	20.606.020	70	20.812.080		
1.06.04.1.02.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				4.000.000		10.100.000		10.201.000		10.303.010		10.406.040		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	30	50	4.000.000	55	10.100.000	60	10.201.000	65	10.303.010	70	10.406.040		
1.06.04.1.02.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				0		20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	2	2	0	2	20.200.000	2	20.402.000	2	20.606.020	2	20.812.080		
1.06.04.1.02.0011 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				0		10.100.000		10.201.000		10.303.010		10.406.040		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1	1	0	1	10.100.000	1	10.201.000	1	10.303.010	1	10.406.040		
1.06.04.1.02.0023 - Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti				0		20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		
Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi (Orang)	2	2	0	2	20.200.000	2	20.402.000	2	20.606.020	2	20.812.080		
1.06.04.1.02.0003 - Penyediaan Sandang				75.000.000		45.450.000		45.904.500		46.363.545		46.827.180		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	30	50	75.000.000	55	45.450.000	60	45.904.500	65	46.363.545	70	46.827.180		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				1.443.761.172		1.178.266.000		1.190.048.660		1.201.949.146		1.213.968.632		
1.06.04.1.03.0003 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				169.999.996		151.500.000		153.015.000		154.545.150		156.090.601		
Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	23	25	169.999.996	27	151.500.000	29	153.015.000	31	154.545.150	33	156.090.601		
1.06.04.1.03.0017 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				111.998.000		80.800.000		81.608.000		82.424.080		83.248.320		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	111.998.000	1	80.800.000	1	81.608.000	1	82.424.080	1	83.248.320		
1.06.04.1.03.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				346.786.176		222.200.000		224.422.000		226.666.220		228.932.882		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	23	25	346.786.176	27	222.200.000	29	224.422.000	31	226.666.220	33	228.932.882		
1.06.04.1.03.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				208.112.000		186.850.000		188.718.500		190.605.685		192.511.741		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	23	25	208.112.000	27	186.850.000	29	188.718.500	31	190.605.685	33	192.511.741		
1.06.04.1.03.0012 – Pemulasaraan				20.000.000		20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		
Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi (Orang)	2	2	20.000.000	2	20.200.000	2	20.402.000	2	20.606.020	2	20.812.080		
1.06.04.1.03.0018 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar				0		20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)	23	25	0	27	20.200.000	29	20.402.000	31	20.606.020	33	20.812.080		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.1.03.0001 - Penyediaan Permakanan				425.865.000		303.000.000		306.030.000		309.090.300		312.181.203		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	23	25	425.865.000	27	303.000.000	29	306.030.000	31	309.090.300	33	312.181.203		
1.06.04.1.03.0015 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar				0		11.716.000		11.833.160		11.951.491		12.071.005		
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)	1	1	0	1	11.716.000	1	11.833.160	1	11.951.491	1	12.071.005		
1.06.04.1.03.0016 - Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				6.000.000		6.060.000		6.120.600		6.181.806		6.243.624		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	0	25	6.000.000	27	6.060.000	29	6.120.600	31	6.181.806	33	6.243.624		
1.06.04.1.03.0004 - Penyediaan Alat Bantu				0		20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	3	3	0	3	20.200.000	3	20.402.000	3	20.606.020	3	20.812.080		
1.06.04.1.03.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				4.000.000		4.040.000		4.080.400		4.121.204		4.162.416		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	23	25	4.000.000	27	4.040.000	29	4.080.400	31	4.121.204	33	4.162.416		
1.06.04.1.03.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				51.000.000		50.500.000		51.005.000		51.515.050		52.030.200		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	2	2	51.000.000	2	50.500.000	2	51.005.000	2	51.515.050	2	52.030.200		

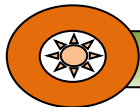


BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.1.03.0011 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				0		20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	2	2	0	2	20.200.000	2	20.402.000	2	20.606.020	2	20.812.080		
1.06.04.1.03.0002 - Penyediaan Sandang				100.000.000		80.800.000		81.608.000		82.424.080		83.248.320		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	23	25	100.000.000	27	80.800.000	29	81.608.000	31	82.424.080	33	83.248.320		
1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				433.443.456		267.650.000		270.326.500		273.029.765		275.750.060		
1.06.04.1.04.0003 - Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses				146.399.600		50.500.000		51.005.000		51.515.050		52.020.200		
Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	0	10	146.399.600	10	50.500.000	10	51.005.000	10	51.515.050	10	52.020.200		
1.06.04.1.04.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				27.106.312		25.250.000		25.502.500		25.757.525		26.015.100		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti (Dokumen)	0	1	27.106.312	1	25.250.000	1	25.502.500	1	25.757.525	1	26.015.100		
1.06.04.1.04.0006 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				137.025.544		10.100.000		10.201.000		10.303.010		10.406.040		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	0	10	137.025.544	10	10.100.000	10	10.201.000	10	10.303.010	10	10.406.040		
1.06.04.1.04.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				9.080.000		10.100.000		10.201.000		10.303.010		10.406.040		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	0	10	9.080.000	10	10.100.000	10	10.201.000	10	10.303.010	10	10.406.040		



RENSTRA 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.1.04.0007 - Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar				0		10.100.000		10.201.000		10.303.010		10.406.040		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	0	10	0	10	10.100.000	10	10.201.000	10	10.303.010	10	10.406.040		
1.06.04.1.04.0010 - Pemulangan ke Daerah Asal				0		25.250.000		25.502.500		25.757.525		26.015.100		
Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi (Orang)	0	1	0	1	25.250.000	1	25.502.500	1	25.757.525	1	26.015.100		
1.06.04.1.04.0017 – Pemulasaraan				0		10.100.000		10.201.000		10.303.010		10.406.040		
Terlaksananya pemulasaraan bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi (Orang)	0	2	0	2	10.100.000	2	10.201.000	2	10.303.010	2	10.406.040		
1.06.04.1.04.0016 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis				0		10.100.000		10.201.000		10.303.010		10.406.040		
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan (Orang)	0	10	0	10	10.100.000	10	10.201.000	10	10.303.010	10	10.406.040		
1.06.04.1.04.0001 - Penyediaan Permakanan				98.832.000		70.700.000		71.407.000		72.121.070		72.842.280		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	0	10	98.832.000	10	70.700.000	10	71.407.000	10	72.121.070	10	72.842.280		
1.06.04.1.04.0013 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis				0		5.050.000		5.100.500		5.151.505		5.203.020		
TTerpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi (Orang)	0	1	0	1	5.050.000	1	5.100.500	1	5.151.505	1	5.203.020		
1.06.04.1.04.0009 - Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				0		10.100.000		10.201.000		10.303.010		10.406.040		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	0	10	0	10	10.100.000	10	10.201.000	10	10.303.010	10	10.406.040		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.1.04.0004 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				0		5.050.000		5.100.500		5.151.505		5.203.020		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	0	10	0	10	5.050.000	10	5.100.500	10	5.151.505	10	5.203.020		
1.06.04.1.04.0014 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				0		10.100.000		10.201.000		10.303.010		10.406.040		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	0	2	0	2	10.100.000	2	10.201.000	2	10.303.010	2	10.406.040		
1.06.04.1.04.0015 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				0		5.050.000		5.100.500		5.151.505		5.203.020		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	0	2	0	2	5.050.000	2	5.100.500	2	5.151.505	2	5.203.020		
1.06.04.1.04.0002 - Penyediaan Sandang				15.000.000		10.100.000		10.201.000		10.303.010		10.406.040		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	0	10	15.000.000	10	10.100.000	10	10.201.000	10	10.303.010	10	10.406.040		
1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti				138.451.316		348.450.000		351.934.500		355.453.815		359.008.380		
1.06.04.1.05.0003 - Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses				0		20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		
Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	0	72	0	72	20.200.000	72	20.402.000	72	20.606.020	72	20.812.080		



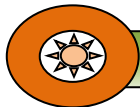
RENSTRA 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.1.05.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				138.451.316		40.400.000		40.804.000		41.212.040		41.624.160		
Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA (Dokumen)	3	1	138.451.316	1	40.400.000	1	40.804.000	1	41.212.040	1	41.624.160		
1.06.04.1.05.0006 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				0		10.100.000		10.201.000		10.303.010		10.406.040		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	0	72	0	72	10.100.000	72	10.201.000	72	10.303.010	72	10.406.040		
1.06.04.1.05.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				0		20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	0	72	0	72	20.200.000	72	20.402.000	72	20.606.020	72	20.812.080		
1.06.04.1.05.0007 - Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar				0		10.100.000		10.201.000		10.303.010		10.406.040		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	0	72	0	72	10.100.000	72	10.201.000	72	10.303.010	72	10.406.040		
1.06.04.1.05.0010 - Pemulangan ke Daerah Asal				0		55.550.000		56.105.500		56.666.555		57.233.220		
Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal (Orang)	0	72	0	72	55.550.000	72	56.105.500	72	56.666.555	72	57.233.220		
1.06.04.1.05.0018 – Pemulasaraan				0		10.100.000		10.201.000		10.303.010		10.406.040		
Terlaksananya pemulasaraan bagi penyandang disabilitas kewenangan provinsi	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi (Orang)	0	2	0	2	10.100.000	2	10.201.000	2	10.303.010	2	10.406.040		



RENSTRA 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.1.05.0016 - Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya				0		25.250.000		25.502.500		25.757.525		26.015.100		
Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya (Orang)	0	72	0	72	25.250.000	72	25.502.500	72	25.757.525	72	26.015.100		
1.06.04.1.05.0017 - Pelaksanaa n Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah				0		20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		
Terlaksananya Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah (Orang)	0	72	0	72	20.200.000	72	20.402.000	72	20.606.020	72	20.812.080		
1.06.04.1.05.0015 - Pelaksana an Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				0		15.150.000		15.301.500		15.454.515		15.609.060		
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi (Orang)	0	72	0	72	15.150.000	72	15.301.500	72	15.454.515	72	15.609.060		
1.06.04.1.05.0001 - Penyedia an Permakanan				0		40.400.000		40.804.000		41.212.040		41.624.160		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	0	72	0	72	40.400.000	72	40.804.000	72	41.212.040	72	41.624.160		
1.06.04.1.05.0013 - Fasilita si Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS				0		30.300.000		30.603.000		30.909.000		31.218.120		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi (Orang)	0	72	0	72	30.300.000	72	30.603.000	72	30.909.000	72	31.218.120		
1.06.04.1.05.0009 - Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				0		15.150.000		15.301.500		15.454.515		15.609.060		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	0	72	0	72	15.150.000	72	15.301.500	72	15.454.515	72	15.609.060		
1.06.04.1.05.0004 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				0		5.050.000		5.100.500		5.151.505		5.203.020		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	0	72	0	72	5.050.000	72	5.100.500	72	5.151.505	72	5.203.020		
1.06.04.1.05.0014 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				0		20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		
Terpenuhinya orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	0	72	0	72	20.200.000	72	20.402.000	72	20.606.020	72	20.812.080		
1.06.04.1.05.0002 - Penyediaan Sandang				0		10.100.000		10.201.000		10.303.010		10.406.040		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	0	72	0	72	10.100.000	72	10.201.000	72	10.303.010	72	10.406.040		



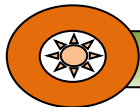
RENSTRA 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				3.086.872.994		4.087.369.000		4.128.242.690		4.169.525.116		4.211.220.365		
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	100	100	3.086.872.994	100	4.087.369.000	100	4.128.242.690	100	4.169.525.116	100	4.211.220.365	1.06.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Sosial	
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	0,3	8,77		9,57		10,36		11,16		11,96			
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	12,99	16,99		17,4		18,21		19,02		20,23			
1.06.05.1.01 - Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal				91.824.002		127.361.000		128.634.610		129.920.956		131.220.165		
1.06.05.1.01.0001 - Pengangkatan Anak antar WNI				91.824.002		117.261.000		118.433.610		119.617.946		120.814.125		
Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan yang Provinsi (Orang)	17	17	91.824.002	18	117.261.000	19	118.433.610	20	119.617.946	21	120.814.125		
1.06.05.1.01.0002 - Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal				0		10.100.000		10.201.000		10.303.010		10.406.040		
Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	0	1	0	1	10.100.000	1	10.201.000	1	10.303.010	1	10.406.040		
1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi				2.995.048.992		3.960.008.000		3.999.608.080		4.039.604.160		4.080.000.200		
1.06.05.1.02.0011 - Fasilitas Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.413.084.360		655.793.000		662.350.930		668.974.439		675.664.183		
Terlaksananya fasilitas bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota (Orang)	532	550	1.413.084.360	600	655.793.000	650	662.350.930	700	668.974.439	750	675.664.183		

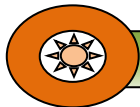


RENSTRA 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05.1.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi				0		30.300.000		30.603.000		30.909.030		31.218.120		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin (Kab/Kota)	6	6	0	6	30.300.000	6	30.603.000	6	30.909.030	6	31.218.120		
1.06.05.1.02.0003 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				0		135.340.000		136.693.400		138.060.334		139.440.937		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi (Orang)	15	30	0	30	135.340.000	30	136.693.400	30	138.060.334	30	139.440.937		
1.06.05.1.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				1.581.964.632		3.138.575.000		3.169.960.750		3.201.660.357		3.233.676.960		
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	23.000	4200	1.581.964.632	4.300	3.138.575.000	4.500	3.169.960.750	4.700	3.201.660.357	5.000	3.233.676.960		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1.369.277.176		1.388.285.400		1.402.168.254		1.416.189.936		1.430.351.833		
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	100	100	1.369.277.176	100	1.388.285.400	100	1.402.168.254	100	1.416.189.936	100	1.430.351.833	1.06.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Sosial	
	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase masyarakat didaerah rawan bencana yang meningkat kasiapsiagaannya (%)	16	20		22		24		26		28			
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi (%)	100	100		100		100		100		100			
1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				1.369.277.176		1.388.285.400		1.402.168.254		1.416.189.936		1.430.351.833		
1.06.06.1.01.0016 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Bencana				0		25.250.000		25.502.500		25.757.525		26.015.100		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)	829	829	0	829	25.250.000	829	25.502.500	829	25.757.525	829	26.015.100		
1.06.06.1.01.0018 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah				0		38.632.500		39.018.825		39.409.013		39.803.103		
Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana (Orang)	880	880	0	880	38.632.500	880	39.018.825	880	39.409.013	880	39.803.103		
1.06.06.1.01.0011 - Penyediaan Sandang				62.500.000		247.450.000		249.924.500		252.423.745		254.947.982		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi (Orang)	450	1.000	62.500.000	1.000	247.450.000	1.000	249.924.500	1.000	252.423.745	1.000	254.947.982		
1.06.06.1.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				55.000.000		73.730.000		74.467.300		75.211.973		75.964.092		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi (Orang)	90	100	55.000.000	100	73.730.000	100	74.467.300	100	75.211.973	100	75.964.092		
1.06.06.1.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial				15.000.000		15.442.900		15.597.329		15.753.302		15.910.835		
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi (Orang)	15	100	15.000.000	100	15.442.900	100	15.597.329	100	15.753.302	100	15.910.835		
1.06.06.1.01.0001 - Penyediaan Permakanan				1.174.221.176		826.180.000		834.441.800		842.786.218		851.214.080		
Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi (Orang)	54.094	2.200	1.174.221.176	2.300	826.180.000	2.500	834.441.800	2.700	842.786.218	3.000	851.214.080		
1.06.06.1.01.0015 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda				0		20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		
Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	750	750	0	750	20.200.000	750	20.402.000	750	20.606.020	750	20.812.080		

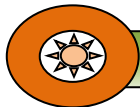


BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.06.1.01.0013 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				62.556.000		141.400.000		142.814.000		144.242.140		145.684.561		
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi (Orang)	2	100	62.556.000	100	141.400.000	100	142.814.000	100	144.242.140	100	145.684.561		
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				412.501.404		612.868.000		618.996.680		625.186.646		631.438.511		
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	412.501.404	100	612.868.000	100	618.996.680	100	625.186.646	100	631.438.511	1.06.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Sosial	
1.06.07.1.01 - Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				412.501.404		612.868.000		618.996.680		625.186.646		631.438.511		
1.06.07.1.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				412.501.404		538.128.000		543.509.280		548.944.372		554.433.815		
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Makam)	2	2	412.501.404	2	538.128.000	2	543.509.280	2	548.944.372	2	554.433.815		
1.06.07.1.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				0		25.250.000		25.502.500		25.757.525		26.015.100		
Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Laporan)	0	2	0	2	25.250.000	2	25.502.500	2	25.757.525	2	26.015.100		
1.06.07.1.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				0		49.490.000		49.984.900		50.484.749		50.989.596		
Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Dokumen)	0	2	0	2	49.490.000	2	49.984.900	2	50.484.749	2	50.989.596		

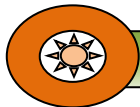


RENSTRA 2025 - 2029

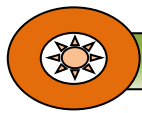
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				84.044.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	10	11	84.044.000	12	100.000.000	13	100.000.000	14	100.000.000	15	100.000.000	1.06.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Sosial, Dukcapil	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	55	56		57		58		59		60			
2.12.02.1.02 - Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan				84.044.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1	84.044.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)													
2.12.02.1.02.0001 - Fasilitasi Terkait Pendaftaran penduduk				84.044.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Terkait Pendaftaran penduduk Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1	84.044.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.12.02.1.02.0004 - Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar Lembaga pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.12.02.1.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan				0		0		0		0		0		
Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaan Penduduk				0		0		0		0		0		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				76.264.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99	99,2	76.264.000	99,3	150.000.000	99,4	150.000.000	99,5	150.000.000	99,6	150.000.000	1.06.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Sosial, Dukcapil	
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100		100		100		100					
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100		100		100		100					
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100		100		100		100					
2.12.03.1.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi				76.264.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil (Laporan)			76.264.000		100.000.000		100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1		1		1							
2.12.03.1.02.0001 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil				76.264.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	76.264.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.12.03.1.02.0002- Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.12.03.1.03 - Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Persentase Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.12.03.1.03.0002 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				103.206.000		103.206.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan (Persentase)	100	100	103.206.000	100	103.206.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	1.06.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Sosial, Dukcapil	
2.12.04.1.03 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				103.206.000		103.206.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Orang)	30	30	103.206.000	30	103.206.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000		
2.12.04.1.03.0002 - Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				103.206.000		103.206.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Orang)	30	30	103.206.000	30	103.206.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000		
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				86.327.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	86.327.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	1.06.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Sosial, Dukcapil	
2.12.05.1.01 - Penyediaan Profil Kependudukan				86.327.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Jumlah dokumen penyediaan data kependudukan provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan provinsi yang tersedia (Dokumen)	1	1	86.327.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.12.05.1.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Provinsi				86.327.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan provinsi yang tersedia (Dokumen)	1	1	86.327.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

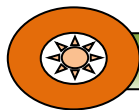


4.4. Subkegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

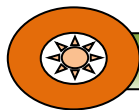
Adapun subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas daerah sebagaimana tabel di bawah ini :

TABEL 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

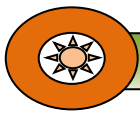
NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.06.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1.	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	1.06.02.1.01 - Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
			1.06.02.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
			1.06.02.1.02 – Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
			1.06.02.1.02.0003 – Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	
			1.06.02.1.02.0004 – Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	
			1.06.02.3.02.0005 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi	
2.	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05.1.01 - Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
			1.06.05.1.01.0001 - Pengangkatan Anak antar WNI	
			1.06.05.1.01.0002 - Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
			1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
			1.06.05.1.02.0003 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			1.06.05.1.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			1.06.05.1.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
3.	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
			1.06.06.1.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
			1.06.06.1.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			1.06.06.1.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	
			1.06.06.1.01.0011 - Penyediaan Sandang	
			1.06.06.1.01.0013 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	



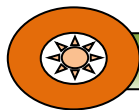
NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.06.06.1.01.0015 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	
			1.06.06.1.01.0016 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	
			1.06.06.1.01.0018 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	
4.	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
			1.06.04.1.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
			1.06.04.1.01.0002 - Penyediaan Sandang	
			1.06.04.1.01.0003 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
			1.06.04.1.01.0004 - Penyediaan Alat Bantu	
			1.06.04.1.01.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
			1.06.04.1.01.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
			1.06.04.1.01.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
			1.06.04.1.01.0009 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			1.06.04.1.01.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			1.06.04.1.01.0011 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			1.06.04.1.01.0015 - Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	
			1.06.04.1.01.0016 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	
			1.06.04.1.01.0017 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	
			1.06.04.1.01.0019 - Pemulasaraan	
			1.06.04.1.01.0020 - Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	
			1.06.04.1.01.0021 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	
			1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
			1.06.04.1.02.0001 - Pengasuhan	
			1.06.04.1.02.0003 - Penyediaan Sandang	
			1.06.04.1.02.0004 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
			1.06.04.1.02.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	



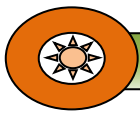
NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.06.04.1.02.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
			1.06.04.1.02.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
			1.06.04.1.02.0009 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			1.06.04.1.02.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			1.06.04.1.02.0011 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			1.06.04.1.02.0015 - Penyediaan Permakanan	
			1.06.04.1.02.0017 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
			1.06.04.1.02.0018 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	
			1.06.04.1.02.0019 – Pemulasaraan	
			1.06.04.1.02.0020 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	
			1.06.04.1.02.0021 - Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
			1.06.04.1.02.0022 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	
			1.06.04.1.02.0023 - Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	
			1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
			1.06.04.1.03.0001 - Penyediaan Permakanan	
			1.06.04.1.03.0002 - Penyediaan Sandang	
			1.06.04.1.03.0003 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
			1.06.04.1.03.0004 - Penyediaan Alat Bantu	
			1.06.04.1.03.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	
			1.06.04.1.03.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
			1.06.04.1.03.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
			1.06.04.1.03.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			1.06.04.1.03.0011 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			1.06.04.1.03.0012 – Pemulasaraan	
			1.06.04.1.03.0015 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	
			1.06.04.1.03.0016 - Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	
			1.06.04.1.03.0017 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.06.04.1.03.0018 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	
			1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
			1.06.04.1.04.0001 - Penyediaan Permakanan	
			1.06.04.1.04.0002 - Penyediaan Sandang	
			1.06.04.1.04.0003 - Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	
			1.06.04.1.04.0004 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
			1.06.04.1.04.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
			1.06.04.1.04.0006 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
			1.06.04.1.04.0007 - Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	
			1.06.04.1.04.0009 - Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			1.06.04.1.04.0010 - Pemulangan ke Daerah Asal	
			1.06.04.1.04.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	
			1.06.04.1.04.0013 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	
			1.06.04.1.04.0014 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			1.06.04.1.04.0015 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			1.06.04.1.04.0016 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	
			1.06.04.1.04.0017 - Pemulasaraan	
			1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
			1.06.04.1.05.0001 - Penyediaan Permakanan	
			1.06.04.1.05.0002 - Penyediaan Sandang	
			1.06.04.1.05.0003 - Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	
			1.06.04.1.05.0004 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
			1.06.04.1.05.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
			1.06.04.1.05.0006 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
			1.06.04.1.05.0007 - Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.06.04.1.05.0009 - Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			1.06.04.1.05.0010 - Pemulangan ke Daerah Asal	
			1.06.04.1.05.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	
			1.06.04.1.05.0013 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	
			1.06.04.1.05.0014 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			1.06.04.1.05.0015 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
			1.06.04.1.05.0016 - Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
			1.06.04.1.05.0017 - Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	
			1.06.04.1.05.0018 - Pemulasaraan	
5.	1.06.03 – PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya layanan penanganan Warga Negara migran korban tindak kekerasan	1.06.03.1.01 – Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	
			1.06.03.1.01.0003 – Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	
6.	1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	1.06.07.1.01 - Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
			1.06.07.1.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
			1.06.07.1.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
			1.06.07.1.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
7.	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	2.12.02.1.02 - Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
			2.12.02.1.02.0001 - Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	



4.5. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target untuk tahun 2025 sampai dengan 2030 sebagaimana tabel di bawah ini :

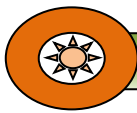
TABEL 4.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KE T
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	1.06.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	51,92	52,23	53,79	55,4	57,06	58,77	60,53	
2	Persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan sosial	%	43,77	20	21,25	21,95	23,18	24,42	26,19	
3	Jumlah Daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	Jumlah	0	1	1	1	1	1	1	

4.6. Indikator Kinerja Kunci

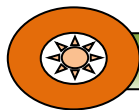
Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator turunan yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek operasional dan teknis dari pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo. IKK berperan penting dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), serta menjadi alat pemantauan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan program yang dijalankan oleh masing-masing bidang.

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo telah menentukan target penyelenggaraan urusan sosial melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tabel di bawah ini :



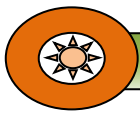
Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi		%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	positif	Persentase	12,99	16,19	16,99	17,4	18,21	19,02	20,23	
5	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	positif	Persentase	0,3	7,97	8,77	9,57	10,36	11,16	11,96	
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase sarana prasarana yang disediakan bagi peyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan/atau gelandangan dan pengemis didalam panti yang layak dan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase sarana prasarana bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang disediakan secara layak dan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL										
1	Jumlah Daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori “Sangat Baik”	positif	Jumlah	0	1	1	1	1	1	1	
2	Tingkat Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Kumulatif	%	66,67	67,56	68,44	69,33	70,22	71,11	72	
3	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Positif	%	10	10	11	12	13	14	15	
7	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Positif	Persentase	55	55	56	57	58	59	60	
8	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Positif	Persentase	99	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	
9	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
12	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Provinsi Yang Tersedia	Positif	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	





BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra Dinas Sosial dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan urusan sosial serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selama periode lima tahun. Renstra ini menjadi acuan wajib dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA), Perjanjian Kinerja, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.

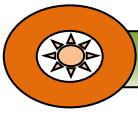
Pelaksanaan Renstra diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan sosial yang inklusif, penguatan perlindungan sosial yang tepat sasaran berbasis data, peningkatan kualitas layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), penguatan kesiapsiagaan dan penanganan bencana sosial maupun bencana alam, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, akurat, terintegrasi, dan berbasis digital.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan komitmen, sinergi, dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah terkait, lembaga kesejahteraan sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025–2029 merupakan pedoman bagi seluruh unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah selama periode perencanaan lima tahunan. Untuk menjamin keterpaduan, konsistensi, dan akuntabilitas pencapaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan Renstra dilakukan dengan kaidah sebagai berikut:

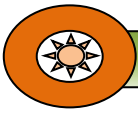
1. Kepala Dinas bertanggung jawab mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Renstra, sedangkan seluruh unit kerja wajib menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan Renstra ke dalam dokumen



perencanaan, penganggaran, dan kinerja tahunan, meliputi Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, serta Rencana Aksi Tahunan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

2. Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan harus dilaksanakan secara konsisten sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dalam hal diperlukan perubahan target, program, kegiatan, dan subkegiatan, perubahan tersebut hanya dapat dilakukan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Dalam rangka menjamin efektivitas pencapaian sasaran pembangunan, pelaksanaan Renstra dilaksanakan dengan menerapkan prinsip manajemen risiko melalui identifikasi, analisis, mitigasi, pemantauan, dan pengendalian risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian target kinerja. Risiko dimaksud antara lain meliputi ketidaktepatan data sasaran penerima manfaat program sosial, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, keterlambatan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta risiko gangguan akses dan kualitas layanan bagi kelompok rentan dan masyarakat penerima layanan. Terhadap risiko tersebut dilakukan langkah mitigasi melalui penguatan tata kelola data, peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, optimalisasi prioritas program, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi.
4. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program serta kegiatan harus didasarkan pada data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi. Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), data kependudukan, serta data sektoral lainnya menjadi dasar dalam penetapan sasaran program, penyusunan kebijakan, pengalokasian sumber daya, dan pengukuran kinerja. Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi tahunan digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan, penyempurnaan strategi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan ketepatan sasaran program secara berkelanjutan.
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara target dan realisasi kinerja, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

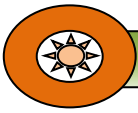
Dengan berpedoman pada kaidah pelaksanaan tersebut, seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat melaksanakan



Renstra secara konsisten, terukur, dan berorientasi pada hasil guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah Tahun 2025–2029.

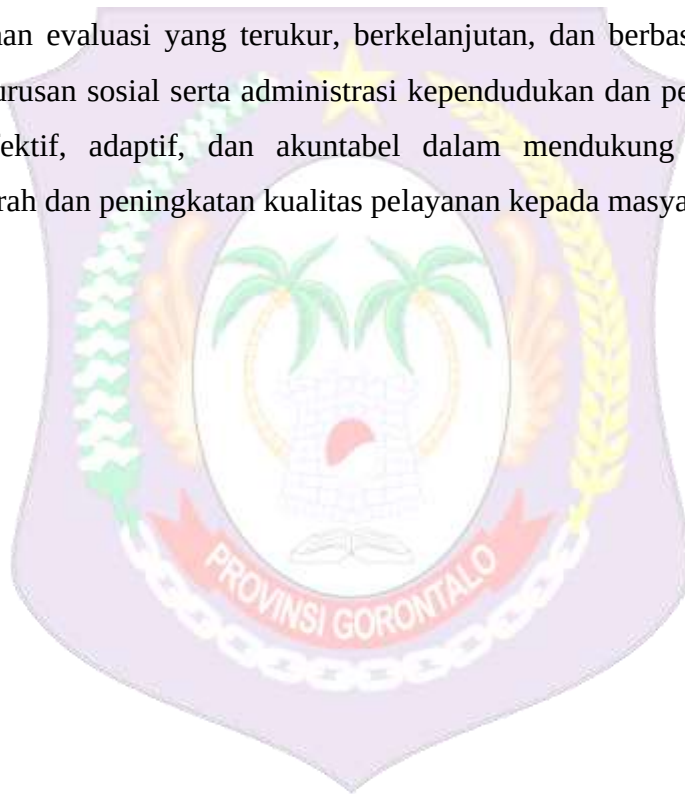
5.3 Pelaksanaan Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

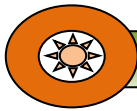
1. Pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengendalian pembangunan daerah untuk memastikan ketercapaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025–2029. Evaluasi dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan berbasis kinerja guna menjamin efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra dilaksanakan secara berkala melalui evaluasi triwulanan, semesteran, dan tahunan terhadap capaian program, kegiatan, subkegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK). Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian target kinerja, mengidentifikasi hambatan dan permasalahan pelaksanaan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah.
3. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi dan dokumen evaluasi, antara lain hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), evaluasi pelaksanaan RPJMD, hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta hasil monitoring dan pemantauan lapangan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan, penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan, perbaikan kualitas layanan, serta penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.
4. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan secara terpisah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah, yaitu urusan sosial dan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Evaluasi urusan sosial difokuskan pada pencapaian sasaran peningkatan kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan, serta penanganan kelompok rentan dan korban bencana. Sementara itu, evaluasi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil difokuskan pada kualitas pelayanan administrasi kependudukan,



pemanfaatan data kependudukan, pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan kabupaten/kota, serta pengembangan layanan berbasis digital. Meskipun dilakukan secara terpisah, evaluasi tetap memperhatikan keterkaitan dan integrasi data serta layanan antarurusan dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

5. Pelaporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sistem informasi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, serta melalui mekanisme pelaporan resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaporan tersebut menjadi instrumen akuntabilitas kinerja sekaligus sumber informasi bagi pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan perbaikan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.
6. Dengan pelaksanaan evaluasi yang terukur, berkelanjutan, dan berbasis data, diharapkan penyelenggaraan urusan sosial serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.





GUHERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUHERNUR GORONTALO
NOMOR 232 / 12 / V / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025-2029 DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
PROVINSI GORONTALO

GUHERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, dimana perangkat daerah harus menyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 108 dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah bahwa tim penyusun Renstra Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Sosial, Kependudukan Dan Pendatongan Sipil Provinsi Gorontalo;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

1

Catatan:

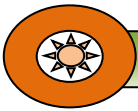
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIRI.

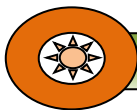
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1812);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lambaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lambaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lambaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lambaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2026 Nomor 1).





MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI GORONTALO.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Sosial, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengkaji dan mengevaluasi hasil capaian program dan kegiatan urusan Sosial serta Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan rencana strategi tahun 2025-2029;
 - melakukan identifikasi masalah dan isu strategis urusan Sosial, Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - merumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, urusan sosial serta urusan kependudukan dan pencatatan sipil, hasil koordinasi dan konsultasi dengan mitra baik Bappeda Provinsi Gorontalo maupun instansi yang menangani urusan Sosial di Kab/Kota;
 - menelaah rancangan awal RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 - 2029;
 - menetapkan indikator kinerja urusan Sosial tahun 2025 - 2029;
 - menetapkan indikator kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 - 2029;
 - menyelaraskan program dan kegiatan dal dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo;
 - menetapkan target kinerja yang harus di capai setiap tahun selama masa Renstra 2025-2029; dan
 - menyusun program dan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang di tetapkan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 MEI 2026



Menandatangani secara elektronik dan
sah secara hukum.

SUKSES SIKES

https://sikes.dit.go.id

Catatan:

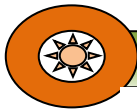
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIRI.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 232 / 12 / V / 2026
TANGGAL 19 MEI 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS SOSIAL,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
GORONTALO

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

- Ketua : Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Provinsi Gorontalo
- Sekretaris : Sekretaris Dinas
- Anggota :
- A. Tim Penyusun Bagian Sekretariat
- Koordinator : Niveta Dwi Jayanti Paramata, STP, M.Ec.Dev (Sekretaris Dinas)
- Anggota : 1. Tizar Abdullah, SE,MM (Fungsional Perencana Ahli Muda)
2. Syairul Hasanoeuddin, S.Kom, M.Si (Kasubag Umum dan
Kepegawaian)
3. Haryati Madina, S.IP (Kasubag Keuangan)
4. Staf dan Fungsional Umum Bagian Sekretariat
- B. Tim Penyusun Bidang Pemberdayaan Sosial
- Koordinator : Didi Wahyudi Hagoe, S.Kom (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial)
- Anggota : 1. Darwis Sidiki, S.Ik, M.Sc (Analis Kebijakan Ahli Muda)
2. Yusran Wartabone, SE (Analis Kebijakan Ahli Muda)
3. Imran Basiru, S.IP (Pekerja Sosial Ahli Muda)
4. Staf dan Fungsional Umum Bidang Pemberdayaan Sosial
- C. Tim Penyusun Bidang Rehabilitasi Sosial
- Koordinator : Sujono Antula, SE, M.Ec.Dev (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial)
- Anggota : 1. Lindawati Rauf, SE (Pekerja Sosial Ahli Muda)
2. Hertina A. Naini, SH (Pekerja Sosial Ahli Muda)
3. Yuyun Y.Komendangi, S.ST, Sp.P.S.M (Pekerja Sosial Ahli
Muda)
4. Staf dan Fungsional Umum Bidang Rehabilitasi Sosial
- D. Tim Penyusun Bidang Penanganan Fakir Miskin
- Koordinator : Indry Pakaya, SE (Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin)
- Anggota : 1. Abdulwahab Utirahman, ST (Pekerja Sosial Ahli Muda)
2. Staf dan Fungsional Umum Bidang Penanganan Fakir Miskin
- E. Tim Penyusun Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Koordinator : Burhanuddin Ahaya Napu, S.Pd, M.Ap (Kepala Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial)
- Anggota : 1. Budi Susanto Yumas, SST, MP5.Sp (Pekerja Sosial Ahli Muda)
2. Rano Saputra, SE (Pekerja Sosial Ahli Muda)
3. Staf dan Fungsional Umum Bidang Perlindungan dan Jaminan
Sosial

4

Catatan:

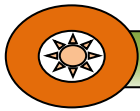
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BKR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





F. Tim Penyusun Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Koordinator : Fitri Ahmad, S.Pd (Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

- Anggota :
1. Fatny Peliati, SE (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda)
 2. Irfan Djafar, S.Sos (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda)
 3. Odi Prawira Husain, S.STP, M.AP (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda)
 4. Staf dan Fungsional Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

G. Bappeda Provinsi Gorontalo

1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

